

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Aprilia Tungga Dewi

NIM : 18313138

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2021

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Aprilia Tungga Dewi

NIM : 18313138

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,



Aprilia Tungga Dewi

PENGESAHAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama : Aprilia Tungga Dewi
Nomor Mahasiswa : 18313138
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D

PENGESAHAN UJIAN

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA)

Disusun Oleh : **APRILIA TUNGGAWATI**
Nomor Mahasiswa : **18313138**

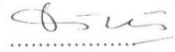
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 14 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.



Penguji : Diana Wijayanti, S.E., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT' serta dengan lantunan doa yang selalu tiada henti kupanjatkan kepada-Mu hingga diriku telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Dan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mba, dan keponakanku selalu memberikan semangat, nasihat, dan doa disetiap sujud kalian diriku bisa sampai ke titik ini. Tanpa doa dan semangat yang kalian berikan aku tidak akan bisa sampai ke titik ini, titik dimana aku dapat menyelesaikan karya ini. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu hadir di setiap sujud kalian yang dipanjatkan untuk masa depanku.



MOTTO

Untuk maju satu tahap lebih baik, terkadang aku perlu memperluas pandanganku pada sekitar.

Tentu saja ada faktor waktu dan faktor lain yang tidak bisa aku abaikan.

Namun, pilihan ada di tangan kita.

(Twoego dalam buku It's Okay To Cry)

Kita harus benar-benar menyadari pilihan kita.

Tidak peduli apakah pilihan tersebut memiliki pengaruh yang besar atau kecil.

Sebab, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik setiap saat.

(Twoego dalam buku It's Okay To Cry)

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, hingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” sebagai syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) dengan melalui program studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dan juga tidak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW telah membawa petunjuk yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya hingga akhir.

Dengan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan baik, penulis menyadari bahwa banyak yang membantu melalui doa, bimbingan, dukungan, dan nasihat dari berbagai pihak. kemudian, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dengan meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga sebagai dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak dan Ibunda tercinta yang selalu mendukung, memberikan doa di dalam sujud pada sepertiga malam, nasihat yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini.
3. Yudho Adhita Fadhillah Humanika yang sudah menemani dan mendukung penulis dalam segala hal, teruntuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak-kakak kandung yang telah memberikan baik, materi ataupun dukungan kepada adik terakhirnya yang telah berjuang menyelesaikan dengan baik skripsi ini.

5. Sahabat-sahabat penulis yaitu Cut Hayatun Naurah, Enggarsani Maulida, Indah Novitasari, Linda Anggita Rahmaningtyas, Sekar Ayu Nawangwulan, Venus Aldheyde Maersk Itanka, terima kasih sudah berbagi ilmu dan informasi selama menjalani perkuliahan hingga tahap akhir. Semoga kita dapat berkumpul kembali lagi nanti.
6. Teman-teman dalam satu naungan program studi Ilmu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas berbagi informasi dan bantuan lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, terima kasih terkhusus untuk diri sendiri karena bisa percaya, melakukan semua hal dengan kerja keras, tidak pernah berhenti, serta kesabaran dari segala hal yang mengejar. Terima kasih sudah melakukan dan memberikan yang terbaik untuk skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena itu harapan dari penulis untuk mendapatkan kritikan dan saran yang dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca umum. Kemudian, harapan penulis pada skripsi ini, semoga kedepannya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk pembaca umum dan untuk penulis sendiri.

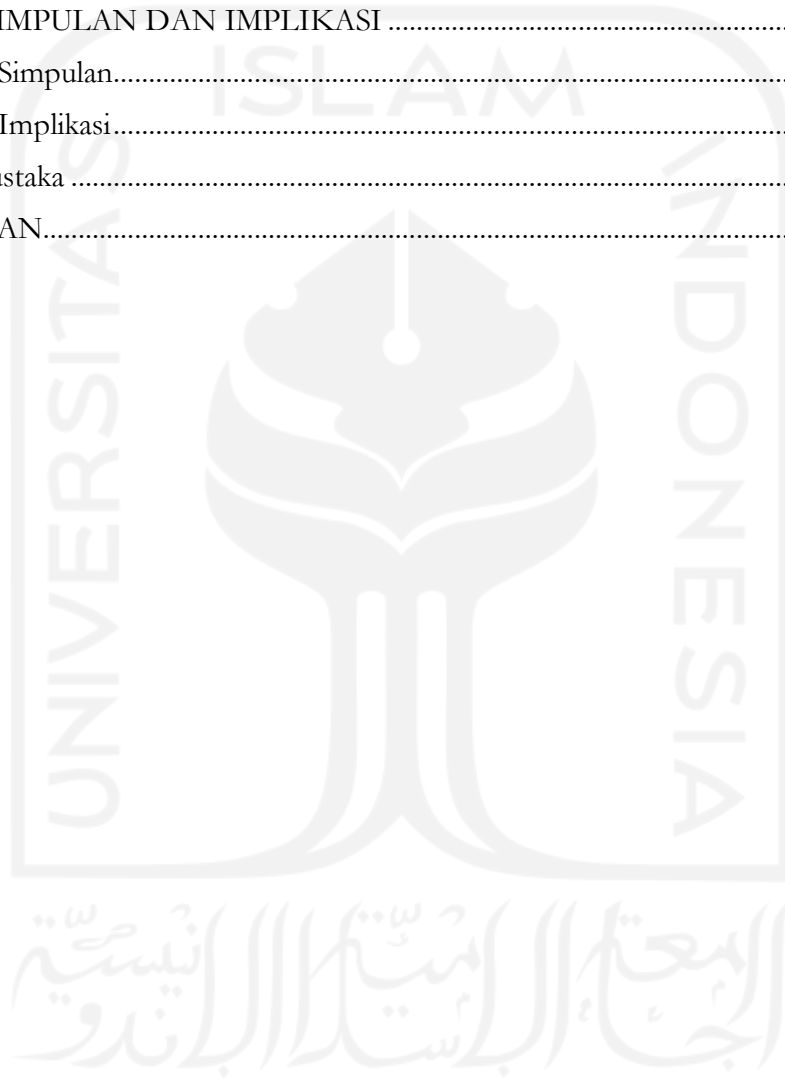
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN UJIAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.2.3 Dana Alokasi Umum	17
2.2.4 Dana Alokasi Khusus	19
2.2.5 Dana Bagi Hasil	21
2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	26
3.2.1 Variabel Dependen.....	26
3.2.2 Variabel Independen.....	26
3.3 Metode Analisis.....	28
3.3.1 <i>Common Effect Method</i> (CEM).....	29
3.3.2 <i>Fixed Effect Method</i> (FEM).....	29
3.3.3 <i>Random Effect Method</i> (REM).....	30
3.3.4 Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi.....	30
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Data Penelitian	33
4.2 Deskripsi Obyek Data Penelitian	33
4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	34
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah	35
4.2.3 Dana Alokasi Umum	41
4.2.4 Dana Alokasi Khusus	45
4.2.5 Dana Bagi Hasil	50
4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	55
4.3 Pemilihan Model Regresi.....	60
4.3.1 Hasil Estimasi Pengujian Menggunakan <i>Common Effect Model</i>	60
4.3.2 Hasil Estimasi Pengujian Menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	62
4.3.3 Uji Chow.....	64
4.4 Hasil Regresi.....	65
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	65
4.4.2 Uji f.....	67
4.4.3 Uji t.....	67
4.5 Hasil Analisis Per-Kabupaten/Kota.....	70
4.6 Interpretasi Hasil Analisis.....	72
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	72

4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	73
4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	74
4.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	74
4.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .	75
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Implikasi.....	78
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR TABEL

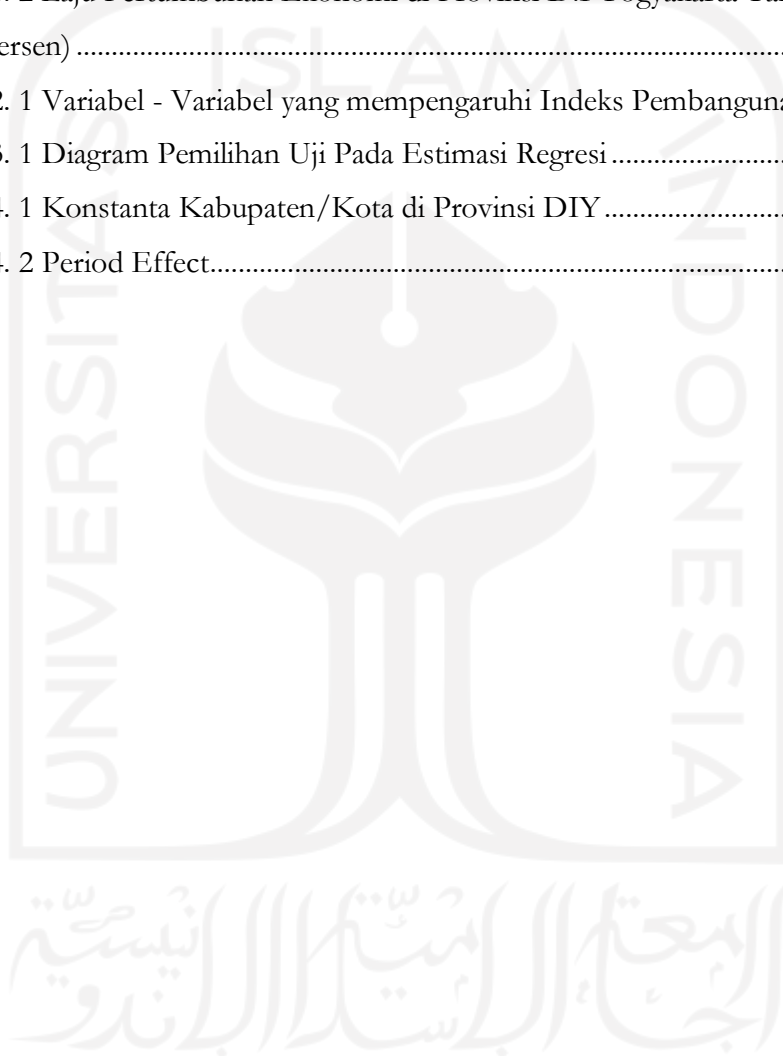
Tabel 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)	34
Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	36
Tabel 4. 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	37
Tabel 4. 4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	38
Tabel 4. 5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	39
Tabel 4. 6 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	40
Tabel 4. 7 Dana Alokasi Umum Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	41
Tabel 4. 8 Dana Alokasi Umum Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	42
Tabel 4. 9 Dana Alokasi Umum Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	43
Tabel 4. 10 Dana Alokasi Umum Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	44
Tabel 4. 11 Dana Alokasi Umum Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	45
Tabel 4. 12 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	46
Tabel 4. 13 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	47
Tabel 4. 14 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	48
Tabel 4. 15 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	49
Tabel 4. 16 Dana Alokasi Khusus Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	50
Tabel 4. 17 Dana Bagi Hasil Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	51
Tabel 4. 18 Dana Bagi Hasil Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	52
Tabel 4. 19 Dana Bagi Hasil Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	53

Tabel 4. 20 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah).....	54
Tabel 4. 21 Dana Bagi Hasil Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah).....	55
Tabel 4. 22 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah).....	56
Tabel 4. 23 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)	57
Tabel 4. 24 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020	58
Tabel 4. 25 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020	59
Tabel 4. 26 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020	60
Tabel 4. 27 Hasil Pengolahan Data dengan <i>Common Effect Model</i>	61
Tabel 4. 28 Hasil Pengolahan Data dengan <i>Fixed Effect Model</i>	62
Tabel 4. 29 Hasil Estimasi dengan Uji Chow.....	65
Tabel 4. 30 <i>Crosseffect Fixed Effect Models</i>	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen).....	3
Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)	5
Gambar 2. 1 Variabel - Variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia....	24
Gambar 3. 1 Diagram Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi	31
Gambar 4. 1 Konstanta Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	70
Gambar 4. 2 Period Effect.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)	86
Lampiran 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Rupiah)	87
Lampiran 1. 3 Dana Alokasi Umum Per-Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Rupiah)	92
Lampiran 1. 4 Dana Alokasi Khusus Per-Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Rupiah)	97
Lampiran 1. 5 Dana Bagi Hasil Per-Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Rupiah)	102
Lampiran 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Per-Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Rupiah)	106
Lampiran 2. 1 Hasil Pengolahan Data dengan <i>Common Effect Model</i>	111
Lampiran 2. 2 Hasil Pengolahan Data dengan <i>Fixed Effect Model</i>	112
Lampiran 3. 1 Hasil Pengolahan Data dengan Fixed Effect Model	113

ABSTRAK

Tujuan utama dari indeks pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif dan juga pembangunan manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya, yang menempatkan manusia pada tujuan akhir, sekaligus menjadi input dari pembangunan itu sendiri. Untuk mengetahui pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010 hingga tahun 2020.

Data yang digunakan di penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel yang merupakan data gabungan dari data *time series* dan data *cross section* yang terdiri dari lima kabupaten/kota Provinsi DIY yang diperoleh dari laporan publikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Hasil regresi diperoleh dengan menggunakan *fixed effect model* yang diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, DIY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang terjadi pada manusia diciptakan terhadap manusia agar manusia tersebut dapat memiliki kesempatan untuk memiliki umur yang panjang melalui kesehatan yang melimpah, dan menjalankan kehidupan di dunia ini dengan hal-hal yang produktif dan kreatif (Publikasi IPM BPS RI, 2019). Tujuan pembangunan manusia itu sendiri juga harus memberikan manfaat bagi semua umat manusia lainnya. Pembangunan manusia diukur dengan menggunakan tiga aspek, aspek pertama yaitu pembangunan manusia diukur dengan umur panjang dengan menjalani kehidupan yang sehat, aspek kedua yaitu pembangunan manusia yang diukur dengan melalui perolehan sektor pendidikan yang layak, aspek ketiga yaitu pembangunan manusia diukur dengan sebagaimana biasanya bahwa dapat mempermudah memiliki akses standar hidup yang layak (Publikasi IPM BPS RI, 2019). Dengan adanya tiga aspek tersebut, aspek pertama diwakili melalui indikator dalam harapan hidup saat lahir, aspek kedua tentang pendidikan diwakili melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, aspek ketiga tentang standar hidup yang layak diwakili melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan kualitas manusia pada suatu wilayah atau daerah melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya, karena dengan peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia diharapkan mampu menunjang pembangunan di berbagai bidang (Lestari, *et al*, 2016).

Indeks pembangunan manusia juga memiliki nilai tinggi dan rendah di setiap tahunnya yang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi melainkan pada pembangunan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks pembangunan manusia yang meningkat tidak melalui proses yang cepat, melainkan melalui proses yang dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu yang panjang (Publikasi

IPM BPS RI, 2019). Maka dari itu, dapat dikatakan juga pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan pembangunan manusia, jika disertai pembangunan yang merata.

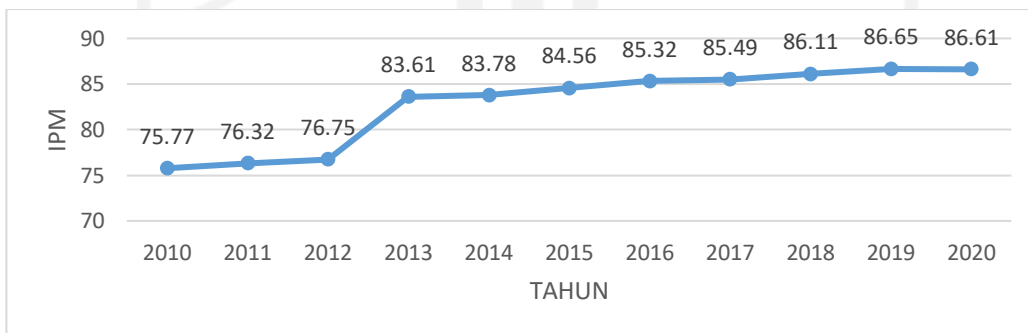
Pembangunan yang merata merupakan pembangunan yang didalamnya terdapat jaminan-jaminan yang diberikan kepada semua masyarakat merasakan hasil-hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya” (Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, Pasal 1). “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan setempat” (Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 1). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah dapat memiliki hak, kewajiban, dan wewenang untuk membentuk pendapatan daerahnya yang diharapkan dapat membuat pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta definisi bagian dari Provinsi di Republik Indonesia yang terdampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur, dan tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km².,
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km².,
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km².,
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km².,
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km².

Beberapa faktor terpilihnya kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah tersebut memiliki kualitas pembangunan manusia yang dimana dalam sebelas tahun semakin membaik dengan ditandai oleh peningkatan indikator komposit indeks pembangunan manusia, kemudian indeks pembangunan manusia provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 mencapai level 79,97 dan berada dalam kategori “IPM Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), selanjutnya capaian indeks pembangunan manusia ini berada di peringkat kedua tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, kemudian total peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan mencapai 4,85 poin selama 2010 hingga 2021 dan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,57 persen per tahun. Berikut ini merupakan gambaran grafik peningkatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama sebelas tahun atau selama tahun 2010 hingga tahun 2020 (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DIY, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)

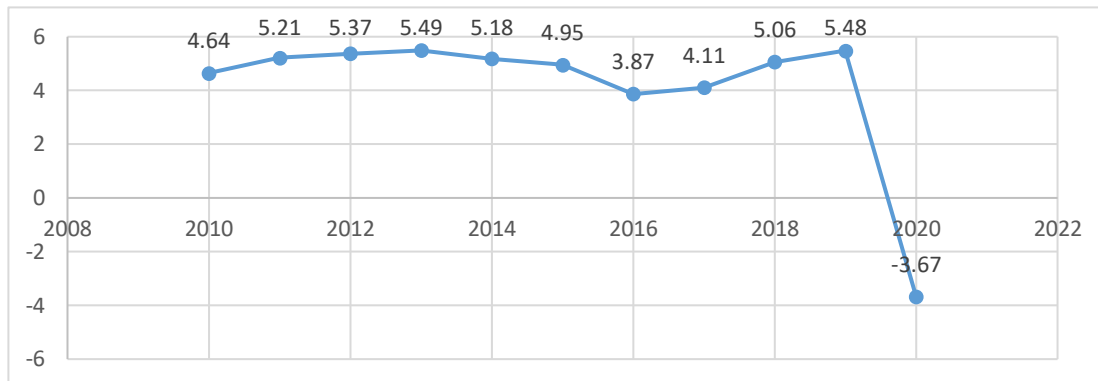
Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2020 yang diolah

Pada periode tahun 2010-2020 yang terdapat dalam Gambar 1.1 diatas, dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi D.I Yogyakarta terus mengalami peningkatan dengan capaian yang berbeda-beda antar-daerah. Tahun 2010 hingga 2013,

IPM D.I Yogyakarta mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 75.77 persen, 76.32 persen, dan 76.75 persen. tahun 2013 hingga 2019 juga mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 83.61 persen, 83.78 persen, 84.56 persen, 85.32 persen, 85.49 persen, 86.11 persen, 86.65 persen. Pada tahun 2020 IPM D.I Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 86.61 persen. Dikarenakan pada tahun 2020 pertumbuhan IPM menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi (Publikasi IPM BPS RI, 2020).

Menurut UNDP hingga akhir 1990-an pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Setyowati dan Yohana, 2012). Penetapan standar makro pembangunan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah di provinsi tersebut (Setyowati dan Yohana, 2012). Pembangunan ekonomi berlangsung melalui pendapatan per kapita nasional riil yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara akan selalu mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan masyarakat/rakyat yang sejahtera dan berkeadilan. (Arsyad, 2004).

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)



Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2020 yang diolah

Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4.64 persen, pada tahun 2011 sebesar 5.21 persen, pada tahun 2012 sebesar 5.37 persen, pada tahun 2013 sebesar 5.49 persen, sementara pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir sebelumnya. Sementara pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4.95 persen, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 3.87 persen, pada tahun 2017 perlahan-lahan meningkat lagi menjadi 4.11 persen, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.06 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 5.48 persen pada tahun 2019. Dikarenakan terjadinya percepatan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan bandara internasional di D.I Yogyakarta (Publikasi PDRB BPS Provinsi DIY, 2020). Untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi di tahun 1998, tercatat pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta mengalami kontraksi sebesar 3.67 persen. D.I Yogyakarta mengalami kontraksi terdalam kedua setelah Provinsi Banten, yang pertumbuhannya *minus* 3,38 persen. Kontraksi ekonomi di D.I Yogyakarta terutama terjadi karena pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kondisi pandemi yang meluas dan masif di DIY, menyebabkan pergerakan manusia dan kegiatan

ekonomi semakin dibatasi. Dalam jangka waktu yang panjang, pandemi ini menyebabkan kontraksi ekonomi (Publikasi PDRB BPS Provinsi DIY, 2020).

Pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengalokasikan belanja daerah melalui pembiayaan pembangunan di daerah-daerah pendukung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil jika alokasinya tepat sasaran (Nindhita, 2018). Membaiknya penerimaan daerah akan berkontribusi pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, membuat daerah mampu membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat (Christy dan Adi, 2009). Meningkatnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Lestari, *et al*, 2016).

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. “PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah” (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6). Pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan daerah yang menggunakan pelaksanaan asas desentralisasi. Selain pengaruh dari pelaksanaan penerapan asas desentralisasi, PAD dapat meningkat atau menurun dilihat ketika apakah PAD tersebut memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penerapan desentralisasi dapat membuat

daerah mudah terlihat pendapat asli daerahnya ketika, memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Peningkatan PAD terhadap APBD selama ini berkisar 10%-30%, artinya terdapat kecenderungan salah dalam memahami bahwa determinan keberhasilan suatu daerah dilihat dari dengan mengupayakan tingkat penerimaan yang setinggi-tingginya (Halim dan Ibnu, 2009). Bappenas (2003) menjelaskan pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia pada daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum, atau yang biasa disebut DAU adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). Pembentukan DAU sesuai dengan undang-undang ukan tanpa alasan tetapi memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya yang sejalan dengan elemen kunci sukses indeks pembangunan manusia yang salah satunya di antaranya adalah munculnya pemerataan daerah. Alokasi DAU berdasar pada kebutuhan daerah yang belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan kebutuhan fiskal tidak memadai karena terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasar standar analisis belanja, ditambah dengan total pengeluaran anggaran terkhusus APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien (Hamid dan Ibnu, 2009).

Dana Alokasi Khusus, atau yang biasa disebut DAK adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). DAK memiliki pemanfaatan yang diterapkan dalam kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,

peningkatan, dan perbaikan pada sarana dan prasarana berbentuk fisik yang memiliki sifat penunjang pembangunan daerah (Ardhani, 2011).

Dana Bagi Hasil, atau yang biasa disebut DBH adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1). DBH bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). DBH didedikasikan untuk mendanai keutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Handayani, 2020). DBH digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah.

Yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah dengan menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen dan untuk variabel independen menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta dengan mengambil periode tahun pada 2010 hingga 2020. Judul yang penulis akan terapkan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta (Periode Tahun 2010-2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis melakukan perumusan masalah yang didasari atas latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

4. Bagaimana pengaruh dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
5. Bagaimana pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian akan dicapai yang berasal dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah tersebut adalah berikut ini:

1. Mengkaji apakah PAD memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Mengkaji apakah DAU memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Mengkaji apakah DAK memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Mengkaji apakah DBH memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
5. Mengkaji apakah Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pemahaman dengan melakukan pengkajian dari faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, PAD, DAU, DAK, DBH, dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Dapat diterapkan untuk menjadi tolak ukur kemampuan dalam memenuhi syarat tugas akhir Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, di Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi Masyarakat dan Akademisi, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan wawasan mengenai pengalokasian pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi standar acuan pada variabel yang digunakan dalam memperbaiki dan meningkatkan presentase IPM Provinsi DIY.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya (Siddiq, *et al.* 2020). Pada penelitian ini dengan mengambil tema mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, maka penulis akan memberikan acuan gambaran dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penulisan penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini:

Setyowati dan Yohana (2012) telah meneliti terkait “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, Pada Tahun 2005-2009)”. Hasil estimasi dengan menggunakan metode analisis regresi data panel adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Selanjutnya, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Selanjutnya, PAD berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Kemudian, Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang diproyeksikan dengan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Legastro (2013) telah meneliti terkait, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2011”. Yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan model regresi data panel melalui metode analisis *random effect model*. Hasil analisis menggunakan *random effect model* adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia dan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Handayani (2020) telah meneliti terkait, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)”. Yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil analisis menggunakan uji asumsi klasik adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Ketiga, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Terakhir, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Putra dan Ulupui (2015) telah meneliti terkait, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Pada Tahun 2009-2013”. Yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model regresi data panel dengan melalui metode regresi linier berganda. Hasil estimasi dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) merupakan salah satu lembaga yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terjadi pada tahun 1990 menerbitkan dan mempopulerkan indeks pembangunan manusia melalui publikasi pada laporan tahunan yang dilakukan secara berkala dengan nama *Human*

Development Report (HDR) 1990 (Publikasi IPM BPS RI, 2019). *Human Development Report (HDR) 1990* dalam publikasi laporan yang dilakukan secara berkala menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang sehat dan produktif dan pada saat yang sama pembangunan manusia adalah kekayaan angsa yang nyata menempatkan manusia pada tujuan akhir dan juga berkontribusi pada perkemangannya sendiri.

Dikatakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*, mengukur pembangunan manusia terjadi dalam tiga pendekatan melalui dimensi dasar, meliputi:

- a. Umur manusia yang panjang dengan melalui kehidupan yang sehat (*a long and healthy life*).
- b. Pembangunan manusia yang didasari dengan pendidikan atau pengetahuan yang layak (*knowledge*).
- c. Pembangunan manusia yang didasari pada kehidupan yang memiliki standar yang layak (*decent standar of living*).

Dimensi yang pertama, dalam perhitungan indeks pembangunan manusia menggunakan indikator harapan hidup seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang bagus pada saat lahir. Dimensi yang kedua, dalam perhitungan indeks pembangunan manusia menggunakan indikator harapan lama sekolah yang ditandai dengan capaian kesempatan yang dimiliki manusia untuk menempuh pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah ditandai dengan stok modal manusia di suatu wilayah yang dimiliki. Dimensi yang ketiga, dalam perhitungan indeks pembangunan manusia menggunakan indikator pendapatan ataupun pengeluaran yang tersedia hingga wilayah kabupaten atau kota. Dengan menerapkan *diminishing return* untuk mengubah pendapatan atau pengeluaran menjadi kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

IPM digunakan dalam penelitian ini karena digunakan untuk mengklasifikasikan negara menjadi negara maju berkembang dan kurang berkembang serta untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Christy dan Adi, 2018). Oleh karena itu, IPM digunakan sebagai indikator komposit untuk mengukur pencapaian kualitatif pembangunan manusia menuju kehidupan yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi (Setyowati dan Yohana, 2012). Terakhir, Suryadi (2008) berpendapat bahwa IPM adalah ukuran pendapatan per kapita yang lebih komprehensif dan kontekstual (berdasarkan nilai tukar dolar AS) untuk menentukan apakah suatu negara didefinisikan sebagai negara maju, berkembang atau kurang berkembang.

Kuantifikasi dari ukuran agregat kualitas manusia dalam pembangunan manusia bernilai antara 0 sampai dengan 100 (UNDP, 2004). Perubahan nilai IPM berbanding lurus dengan besarnya nilai Indeks Y_1 , Y_2 , dan Y_3 di kalikan satu pertiga. Cara mengukur IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = Y_1 \times Y_2 \times Y_3$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y_1 = Indeks Harapan Hidup

Y_2 = Indeks Pendidikan

Y_3 = Indeks Standard Hidup Layak

IPM dapat dikatakan menjadi bagian dari indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia di setiap daerahnya. Capaian indeks pembangunan manusia dikategorikan dalam empat kelompok yaitu pertama jika $IPM \geq 80$ maka bisa disebut dengan status “Sangat Tinggi”. Kedua jika $70 \leq IPM \leq 80$ maka bisa disebut dengan status “Tinggi”. Ketiga jika $60 \leq IPM \leq 70$ maka bisa disebut

dengan status “Sedang”. Terakhir, jika IPM < 60 maka bisa disebut dengan status “Rendah”.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3).

PAD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu bersumber dari: “a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah yaitu meliputi: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.”

Halim dan Ibnu (2009) menyebutkan pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak kota/kabupaten yang dijalankan secara terpusat. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan air, pajak pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor, pajak pengalihan kepemilikan kendaraan air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pajak kota/kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, dan pajak penggalian.

Retribusi daerah terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan

- Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- b. Retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi terminal, retribusi tempat penginapan, retribusi pasar grosir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi saha daerah.
 - c. Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pendendalian, penggunaan SDA, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi jasa yang dimaksudkan oleh Halim dan Ibnu (2011) merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Retribusi jasa tersebut harus memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien yang merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan kualitas pelayanan yang baik.

Dalam upaya meningkatkan PAD, “daerah dilarang: a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-daerah, dan kegiatan impor/ekspor” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 7).

2.2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan

Manusia

“PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3).

Wijaya (2007) juga berpendapat bahwa PAD merupakan pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas untuk setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan dialokasikan untuk kebutuhan transportasi, tempat ibadah, dan pembangunan lainnya yang berkaitan langsung dan memiliki manfaat dengan masyarakat sekitar. PAD memiliki kemampuan yaitu hal mengenai pembiayaan daerah yang termasuk dalam indikator dari kemandirian daerah.

Pendapatan asli daerah harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum seperti pembangunan jalan raya yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, selanjutnya ada retribusi daerah yang terdapat dalam PAD dan juga termasuk dalam retribusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat memiliki manfaat dengan pembangunan layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, indeks pembangunan manusia sangat berpengaruh karena dengan adanya dimensi umur panjang dan sehat dari pembangunan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Diharapkan tidak ada perbedaan antara daerah yang sudah maju dan daerah yang belum maju (daerah tertinggal) melalui DAU.

Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pada Bagian Ketiga, “DAU minimal 26% dari penerimaan dalam negeri.” Oleh karena itu, di

daerah dapat dipastikan penerimaan yang akan diperoleh digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU” menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bagian Ketiga. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap* (celah fiskal) yaitu kebutuhan DAU daerah ditentukan oleh kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) (Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 27). Dengan kata lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah.

Peran strategis distribusi DAU juga terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. DAU bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya kesenjangan fiskal suatu daerah, yaitu selisih antara permintaan daerah (*fiscal demand*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Halim dan Ibnu (2009) menjelaskan bahwa alokasi DAU bagi daerah yang potensi daerah besar namun kebutuhan daerah kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi daerah kecil namun kebutuhan daerah besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Prinsip

tersebut menegaskan bahwa, fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.2.3.1 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan

Manusia

Dengan adanya DAU ini dalam penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kesejahteraan umum yang juga tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar-daerah, sebagaimana yang diatur dalam tuntutan dari otonomi daerah. dalam praktiknya penggunaan DAU ini sesuai dengan kesejahteraan umum, maka pembangunan manusia akan memiliki pengaruh yang sesuai dengan pemanfaatan penggunaan DAU. DAU menggunakan IPM untuk melakukan alokator dalam penentuan DAU tersebut.

2.2.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Proporsi DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibagikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud menurut Halim dan Ibnu (2009) menyebutkan bahwa keutuhan dana untuk peralatan dan infrastruktur kolektif dasar yang mempercepat pembangunan daerah memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk pendanaan DAK.

Penetapan DAK yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa “daerah yang mendapatkan penerimaan DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.” Dana pendamping adalah dana yang diidentifikasi dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah tertentu yang layak secara finansial tidak diharuskan menyediakan dana pendamping. Apabila daerah tidak bisa menggunakan DAK sebagaimana ketentuan teknisnya, sisa DAK di akhir tahun anggaran dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam mekanisme DAK setidaknya tiga Kementerian/Lemaga (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Teknologi dan Kementerian Keuangan) harus mengikuti evaluasi usulan daerah. Partisipasi ketiga Kementerian/Lemaga tersebut dijelaskan oleh fakta bahwa mekanisme DAK yang diusulkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tiga aspek yaitu: (1) aspek prioritas daerah dan arah pembangunan nasional, (2) bimbingan teknis dalam rangka pencapaian tujuan nasional di wilayah sasaran DAK, dan (3) biaya kelayakan dan biaya ketersediaan.

2.2.4.1 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan

Manusia

DAK sebagai dana pendamping dari dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Komponen utama dana perimbangan dalam bentuk DAU yang biasanya hanya cukup untuk menutupi keutuhan belanja kemudian mengambil tempat yang sangat penting dalam pembangunan daerah (Setyowati dan Yohana, 2012). Usman, *et al* (2008) menyebutkan penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah merupakan unsur penting dalam keseluruhan program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Peraturan Menteri Keuangan No.171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2009, Pasal 5 menyebutkan “jumlah bidang DAK menjadi 13 bidang, yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan prasarana pada pemerintahan.”

Jika dalam penerapan penggunaan DAK dilakukan dengan baik, maka selanjutnya dapat memperbaiki mutu pendidikan, peningkatan layanan

kesehatan, dan mencegah terjadi kerusakan infrastruktur yang kemudian hal tersebut akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

2.2.5 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” “Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam)” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Dana bagi hasil bekerja untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan wilayah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) (Halim dan Ibnu, 2009).

“Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a. kehutanan; b. pertambangan umum; c. perikanan; d. pertambangan minyak bumi; e. pertambangan gas bumi; dan f. pertambangan panas bumi” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 11).

“DBH dari penerimaan PBB dan BPHTB di bagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah” sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12 dijelaskan bahwa “DBH dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian: a. 16,2% untuk daerah provinsi, b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, c. 9% untuk biaya pemungutan, d. 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota. e. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan d. 35% dibagikan sebagai insentif kepada

daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.”

Penerimaan BPHTB untuk DBH adalah sebesar 80% dengan rincian sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12 sebagai berikut: “a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, b. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil, dan e. 20% bagian Pemerintah dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.”

Halim dan Ibnu (2009) menjelaskan ada dua implikasi yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya dana bagi hasil, yakni pertama, untuk memperbaiki kepercayaan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga untuk meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat daerah kepada sumber daya yang ada di daerahnya. Kedua, tidak membantu memperbaiki, yang malah dapat memperburuk *horizontal fiscal imbalance*, dorongan konflik perbatasan antar-daerah, dan dorongan untuk melakukan minat pemekaran daerah.

2.2.5.1 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Indeks Pembangunan Manusia

“DBH yang bersumber dari APBN diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil” (Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004, Pasal 1). DBH merupakan sumber bagi pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dimana dana ini bertujuan untuk melakukan keadilan kepada daerah terhadap potensinya sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur yang akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Nindhita, 2018).

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari indikator makro untuk melihat aktivitas perekonomian yang sebenarnya di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi di suatu daerah selama periode satu tahun (Publikasi PDRB BPS

DIY, 2014). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. (Publikasi PDRB BPS DIY, 2020).

PDRB disusun dengan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang dijelaskan melalui atas dasar harga berlaku yang merupakan berasal dari periode penghitungan yang memiliki tujuan untuk melihat struktur dari suatu perekonomian dan harga konstan merupakan berasal tahun dasar yang memiliki tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

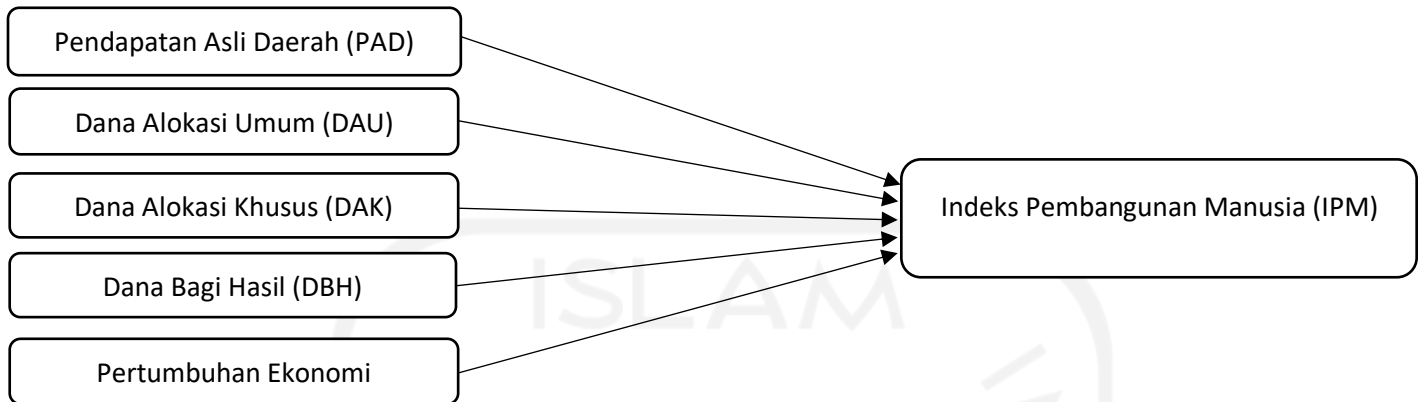
2.2.6.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan

Manusia

Ada keterkaitan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi, karena dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan orang untuk mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan (Setyowati dan Yohana, 2012). UNDP menyatakan hingga akhir tahun 1990-an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik juga mengatakan pada setiap publikasinya bahwa pembangunan ekonomi merupakan keijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja pemerataan distriusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah melalui re-orientasi kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas produk domestik regional bruto (PDRB) akan mempromosikan masyarakat yang lebih terdidik dan lebih sehat yang pada gilirannya akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel indeks pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut ini:



Gambar 2. 1 Variabel - Variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dalam hal ini dipengaruhi oleh rumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

- a. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- b. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- c. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- d. Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- e. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Data tersebut diperoleh dari hasil laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Hasil laporan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil laporan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia merupakan data anggaran yang dipilih berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) menurut kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan data panel atau (*panel pooled data*) yaitu penggabungan dari data *time series* (kurun waktu tertentu) dalam penelitian ini yang meliputi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 atau selama 11 tahun dan data *cross section* dalam penelitian ini menggunakan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

Data *time series* (data runtut waktu) merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu dan dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, bulanan, dan tahunan (Widarjono, 2018). Data *cross section* (data antar tempat/ruang) merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu pada beberapa daerah, perusahaan dan perorangan (Widarjono, 2018). Sementara untuk data panel (*panel pooled data*) merupakan penggabungan data *time series* (runtut waktu) dengan data *cross section* (antar-tempat/ruang) (Widarjono, 2018).

3.2 Definisi Variabel Operasional

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM mengukur angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan angka dalam persen. Nindhita (2018) menyebutkan terdapat pengaruh lain yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu berasal dari meningkatnya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) apabila pengalokasian anggaran tersebut sesuai dan tepat sasaran.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pungutan yang juga disebut “pendapatan daerah yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah berasal dari berbagai sumber di dalam daerah itu sendiri dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah untuk memperketat ketidakmandirian daerah terhadap dana anggaran dari pemerintah pusat” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1). “PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dikenakan dalam juta rupiah. Pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

3.2.2.2 Dana Alokasi Umum

DAU adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun

2004 Pasal 1). DAU dalam penelitian ini dikenakan dalam juta rupiah. DAU ditetapkan pada masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerahnya karena untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat menyangkut implementasi kebijakan otonomi daerah.

3.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

DAK adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). DAK dalam penelitian ini dikenakan dalam juta rupiah. DAK dapat dilihat dalam laporan anggaran pendapatan belanja daerah bagian dana perimbangan keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta.

3.2.2.4 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). DBH dalam penelitian ini dikenakan dalam juta rupiah. DBH dapat dilihat dalam laporan anggaran pendapatan belanja daerah bagian dana perimbangan keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta.

3.2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan tahun 2010 dalam suatu provinsi karena untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi di wilayah D.I Yogyakarta. PDRB dalam penelitian ini dikenakan dalam juta rupiah. PDRB dapat dilihat dalam publikasi PDRB daerah kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta yang berasal dari Badan Pusat Statistik DIY.

3.3 Metode Analisis

Regresi yang menggabungkan data time series dengan data cross section merupakan regresi data panel (*panel pooled data*). Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, adalah pertama, data panel merupakan gabungan dua data, dari data *time series* dan *cross section* yang mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari *data time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). (Widarjono, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan program *software EVIEWS* dan termasuk dalam data panel (*panel pooled data*), dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui PDRB atas harga konstan tahun 2010 menurut kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2020. Sementara untuk variabel terikat pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2020.

Model regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e$$

Keterangan:

y_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
Provinsi DIY (Persen)

β_0 = Konstanta

β_{12345} = Koefisien

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

X_2 = Dana Alokasi Umum (Rupiah)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (Rupiah)

X_4 = Dana Bagi Hasil (Rupiah)

X_5 = Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)

e = eror/kesalahan

i = Kabupaten/Kota
t = Waktu (tahun)

Dengan menggunakan metode regresi data panel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel IPM dipengaruhi oleh variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta periode tahun 2010 hingga tahun 2020. Selanjutnya adalah dengan melakukan pengestimasi regresi data panel. Pengestimasi regresi data panel menggunakan tiga pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan *common effect method*, *fixed effect method*, dan *random effect method*.

3.3.1 Common Effect Method (CEM)

Penggabungan data yang digunakan yaitu data *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan waktu dan perbedaan individu Anda dapat menggunakan metode OLS untuk memperkirakan model data panel (Widarjono, 2018). *Common effect* menggunakan model persamaan regresinya menurut Widarjono (2018) adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e$$

3.3.2 Fixed Effect Method (FEM)

Penggabungan data yang digunakan yaitu data *time series* dan *cross section* dengan melihat adanya perbedaan intersep namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*) dengan menggunakan variabel *dummy* (Widarjono, 2018). Model ini mengasumsikan koefisien regresi (*slope*) tetap antar tempat (Widarjono, 2018). Model ini menggunakan metode teknik variabel *dummy*, melalui proses *Least Squares Dummy Variabel* (LSDV) (Widarjono, 2018).

Fixed effect models menggunakan model persamaan regresi menurut Widarjono (2018) adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_5 D_{3it} + e_{it}$$

3.3.3 *Random Effect Method (REM)*

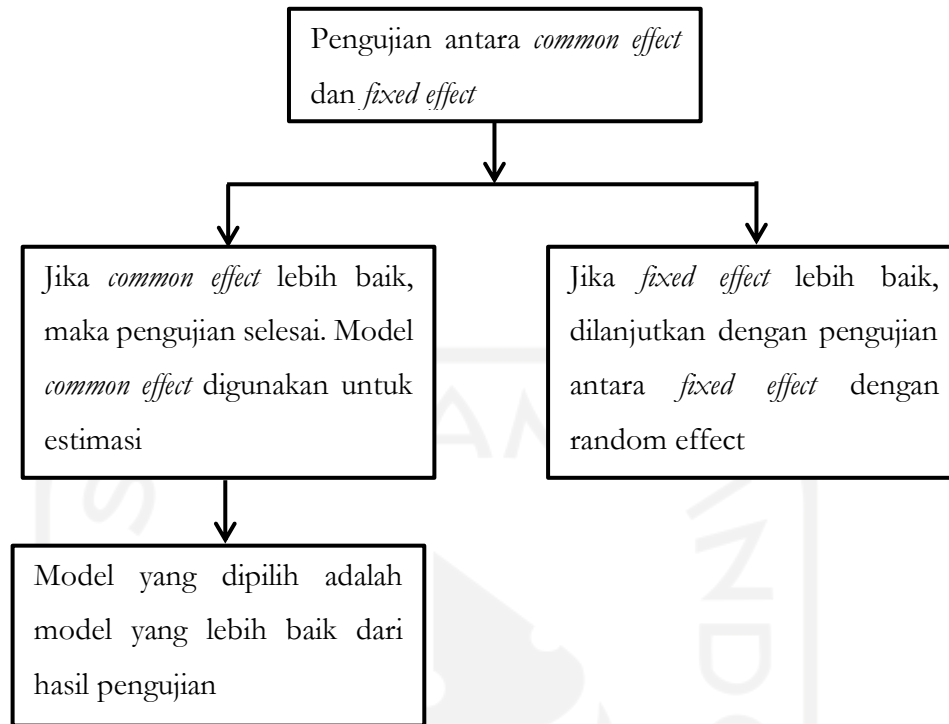
Penggunaan data panel dalam melakukan estimasi dapat dikurangi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dimana variabel ini tetap antar waktu dan berbeda-beda antar individu (Widarjono, 2018). Karena itu, metode ini juga sering disebut *Error Component Model*. Metode yang tepat digunakan adalah *Generalized Least Square (GLS)* (Widarjono, 2018).

Random effect models menggunakan model persamaan regresi menurut Widarjono (2018) adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + v_{it}; v_{it} = e_{it} + \mu_i$$

3.3.4 *Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi*

Pemilihan ini digunakan untuk memilih pilihan yang terbaik dari tiga pemilihan model (*common effect, fixed effect, dan random effect*) dengan ringkasan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Diagram Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi

Sumber: Sriyana, 2014

Dalam memilih tiga pendekatan tersebut, menggunakan beberapa uji yang harus dilakukan dalam mengestimasi regresi data panel. Pertama, Uji Chow (Uji F) yang digunakan untuk memilih antara *common effect* atau *fixed effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect* (Widarjono, 2018).

3.3.4.1 Uji Chow

Uji yang digunakan pada regresi data panel untuk mengetahui dan memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model* dengan melihat *sum of squared* (RSS) (Widarjono, 2018). Dengan penggunaan hipotesis nol adalah *common effect* model lebih baik dan hipotesis alternatif adalah *fixed effect* model lebih baik (Widarjono, 2018). Apabila telah dibandingkan hasilnya menolak hipotesis nol maka model *fixed effect* lebih baik digunakan (Widarjono, 2018). Sebaliknya, jika gagal menolak hipotesis nol maka model *common effect* lebih baik digunakan (Widarjono, 2018).

Adapun uji Chow menggunakan statistiknya adalah sebagai berikut:

$$\text{Chow} = \frac{\text{SSR}_r - \text{SSR}_u}{\frac{\text{SSR}_u}{n - k}}$$

Dimana SSR_R merupakan *sum of squared residuals* tanpa variabel dummy (*common effect*) yaitu sebagai *restricted model* (jumlah residual kuadrat karena ada pembatasan). SSR_U merupakan model *fixed effect* dengan variabel dummy sebagai *unrestricted model* (jumlah residual kuadrat tanpa ada pembatasan). q merupakan jumlah data *time series*. n merupakan jumlah data *cross section*. k = jumlah variabel penjelas.

3.3.4.2 Uji Hausman

Uji ini merupakan lanjutan dari uji *Chow* dimana ketika uji *Chow* dinyatakan menolak hipotesis nol yang artinya memilih *fixed effect method* maka akan dilakukan pengujian lagi dengan menggunakan uji ini (Widarjono, 2018). Pengujian ini untuk menentukan model yang lebih baik antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Dengan penentuan hipotesis adalah hipotesis nol model *random effect* lebih baik. Kemudian, hipotesis alternatifnya adalah model *fixed effect* lebih baik (Widarjono, 2018). Uji ini mengikuti distribusi *chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak k (Widarjono, 2018). Dimana k adalah jumlah variabel independen (Widarjono, 2018). Menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai uji ini lebih besar dari *chi square* maka model yang tepat adalah model *fixed effect* (Widarjono, 2018). Gagal menolak hipotesis nol ketika nilai uji ini lebih kecil dari *chi square* maka model yang tepat digunakan adalah model *random effect* (Widarjono, 2018).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian menggunakan jenis data panel. Data panel merupakan data penggabungan data *time series* (runtut waktu) dengan data *cross section* (antar-tempat/ruang) (Widarjono, 2018). Data *time series* (kurun waktu tertentu) dalam penelitian ini menggunakan periode tahun yang dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2020 atau selama 11 tahun. Data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta yang terdiri dari kabupaten/kota Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

Penelitian ini terdiri variabel indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga 2020. Penetapan variabel ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel tersebut. *Software* yang digunakan dalam penelitian ini untuk membantu pengujian penelitian adalah dengan menggunakan *software EVIEWS 10*.

4.2 Deskripsi Obyek Data Penelitian

Variabel-variabel yang akan diterapkan dalam penelitian adalah terdiri dari variabel dependen adalah indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai Y dan variabel independen adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai X_1 , dana alokasi umum (DAU) sebagai X_2 , dana alokasi khusus (DAK) sebagai X_3 , dana bagi hasil (DBH) sebagai X_4 , dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDRB atas harga konstan tahun 2010 sebagai X_5 yang terjadi pada kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 hingga 2020, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur pencapaian atau keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk (Publikasi IPM BPS DIY, 2020). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indonesia yang diwakili oleh Badan Pusat Statistik mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* mulai tahun 2010 (Publikasi IPM BPS DIY, 2020). IPM menggunakan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat kemajuan pencapaian pembangunan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan data IPM dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada kabupaten/kota di Provinsi DIY yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Dalam Persen)

Kota/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	74,49	75,04	75,33	75,95	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	74,53	75,05	75,51	76,01	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunung Kidul	70,45	70,84	71,11	71,64	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	78,20	78,79	79,39	79,97	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Kota Yogyakarta	79,52	79,89	80,24	80,51	83,78	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY Tahun 2010-2020, diolah

Dapat dilihat dari tabel 4.1, IPM Kulon Progo sejak tahun 2013 naik level dari status “sedang” menjadi “tinggi”. IPM Sleman dan Bantul naik status dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi” sejak tahun 2011 dan 2018.

Sementara, dua wilayah yang lain tidak mengalami perubahan status. IPM Gunung Kidul masih tetap berada dalam status “sedang”, dan Kota Yogyakarta sejak 2010 sudah masuk status “sangat tinggi”. Setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami kenaikan dan kemajuan indeks pembangunan manusia selama 10 tahun yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 IPM seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY mengalami penurunan walaupun masih dikategorikan setiap kabupaten/kota merupakan kategori IPM yang tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$), dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* yang memaksakan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun tajam sehingga lebih rendah dari tahun sebelumnya.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut publikasi BPS (2020) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Publikasi BPS RI, 2020). Penelitian ini menggunakan data PAD dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY yang merujuk pada tabel sebagai berikut:

الجمعة الاستاذة
الاستاذة
الاستاذة

Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	PAD Kabupaten Kulon Progo
2010	48589685
2011	49488455
2012	54293141
2013	95991513
2014	92815160
2015	170822327
2016	172434611
2017	249692649
2018	207069272
2019	237876805
2020	247920164

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.2 di wilayah kabupaten Kulon Progo provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2010 hingga tahun 2017 dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebesar Rp207,069,272. Tahun setelahnya yaitu pada tahun 2019 hingga 2020 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu dari Rp237,876,805 pada tahun 2019, menjadi Rp247,920,164 pada tahun 2020.

**Tabel 4. 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	PAD Kabupaten Bantul
2010	81637099
2011	106885124
2012	121593862
2013	224197864
2014	265128265
2015	390624492
2016	349492790
2017	494179068
2018	420143107
2019	505929472
2020	469798331

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.3. dikatakan bahwa di katakan terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di wilayah kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2010 hingga tahun 2015 dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebesar Rp349,492,790. Di tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2017 mengalami penambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp494,179,068. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan asli daerah kembali sebesar Rp420,143,107. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp505,929,472. Tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan dikarenakan pandemi *covid-19* yang terjadi di wilayah kabupaten Bantul ini sebesar Rp469,798,331.

Tabel 4. 4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	PAD Kabupaten Gunung Kidul
2010	42542031
2011	41835405
2012	55600362
2013	83427448
2014	90333149
2015	196099245
2016	172352154
2017	271370044
2018	208747851
2019	254810945
2020	245880406

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.4, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di wilayah kabupaten Gunung Kidul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah di tahun 2010 sebesar Rp42,542,031 hingga di 2017 mencapai batas tertinggi yaitu sebesar Rp271,370,044. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp208,747,851, peningkatan tersebut juga terjadi secara bertahap pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp254,810,945. Di tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp245,880,406.

**Tabel 4. 5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	PAD Kabupaten Sleman
2010	163056459
2011	170916683
2012	220367231
2013	449270306
2014	383497912
2015	643130080
2016	614410594
2017	825637752
2018	762514524
2019	972049575
2020	944481899

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.5, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di wilayah kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp163,056,459 hingga tahun 2012 sebesar Rp220,367,231. Di tahun 2013 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan hingga Rp449,270,306. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan yang terjadi sebesar Rp383,497,912. Begitupun tahun 2015 sebesar Rp643,130,080, tahun 2016 sebesar Rp614,410,594, dan tahun 2017 sebesar Rp825,637,752 yang mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah. Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp762,514,524. Dua tahun setelahnya yaitu tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp972,094,575 hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp944,481,899.

**Tabel 4. 6 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	PAD Kota Yogyakarta
2010	179423640
2011	182785819
2012	241190745
2013	383052140
2014	404272608
2015	510548823
2016	503488602
2017	657049377
2018	551493528
2019	689049725
2020	671770479

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.6, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di wilayah kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 hingga 2015 pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari Rp179,423,640 hingga tahun 2015 mencapai Rp510,548,823. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp503,488,602. Tahun 2017 mengalami kenaikan pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta sebesar Rp657,049,377. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang terjadi sebesar Rp551,493,528. Pada tahun 2019 sebesar Rp689,049,725 meningkat dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2020 pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta mengalami penurunan sebesar Rp671,770,479.

4.2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer pembagian yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data DAU dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta yang merujuk pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Dana Alokasi Umum Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAU Kabupaten Kulon Progo
2010	411293618
2011	444247738
2012	531104016
2013	594978790
2014	639409211
2015	657260489
2016	718490508
2017	705868940
2018	705868940
2019	732088720
2020	737498209

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.7, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi umum setiap tahunnya di wilayah kabupaten Kulon Progo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan secara signifikan dari pendapatan asli daerah di tahun 2010 sebesar Rp411,293,618 hingga tahun 2016 sebesar Rp718,490,508. Namun di tahun 2017 dan tahun 2018 besaran pendapatan

asli daerah di kabupaten Kulon Progo adalah sama yaitu Rp705,868,940. Peningkatan pendapatan asli daerah juga terjadi di dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 dari sebesar Rp732,088,720 hingga sebesar Rp737,498,209.

Tabel 4. 8 Dana Alokasi Umum Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAU Kabupaten Bantul
2010	573512337
2011	625350000
2012	768034584
2013	854810634
2014	949252188
2015	942850827
2016	999814365
2017	982250842
2018	982250842
2019	1015302849
2020	1025870924

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.8, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi umum setiap tahunnya di wilayah kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana alokasi umum di tahun 2010 hingga 2014 yaitu sebesar Rp573,512,337 hingga sebesar Rp949,252,188. Namun pada tahun 2015 dana alokasi umum di kabupaten bantul mengalami penurunan yaitu sebesar Rp942,850,827. Tahun 2016 dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar Rp999,814,365. Di tahun 2017 dan 2018 dana alokasi umum tetap yaitu sebesar Rp982,250,842. Kenaikan terjadi di dua tahun

selanjutnya yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1,015,302,849 dan tahun 2020 dana alokasi umum tersebut mencapai sebesar Rp1,025,870,924.

Tabel 4. 9 Dana Alokasi Umum Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAU Kabupaten Gunung Kidul
2010	521293704
2011	572300004
2012	687944489
2013	779069238
2014	847388294
2015	872566961
2016	954997369
2017	938221136
2018	938221136
2019	965080463
2020	976430315

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.9, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi umum setiap tahunnya di wilayah kabupaten Gunung Kidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana alokasi umum di tahun 2010 hingga tahun 2016 yaitu sebesar Rp 521,293,704 hingga sebesar Rp 954,997,369. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 besaran dana alokasi umum adalah tetap yaitu sebesar Rp 938,221,136. Kenaikan dana alokasi umum terjadi di dua tahun setelahnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp 965,080,463 dan tahun 2020 sebesar Rp 976,430,315.

**Tabel 4. 10 Dana Alokasi Umum Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	DAU Kabupaten Sleman
2010	563320892
2011	631920663
2012	795708767
2013	891589912
2014	952102502
2015	984410612
2016	1014310630
2017	996492454
2018	996492454
2019	1035862077
2020	1046068391

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.10, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi umum setiap tahunnya di wilayah kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana alokasi umum di tahun 2010 hingga tahun 2016 yaitu sebesar Rp 563,320,892 hingga sebesar Rp 1,014,310,630. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan besaran yang tetap yaitu Rp 996,492,454. Pada tahun 2019 kenaikan dialami dana alokasi umum sebesar Rp 1,035,862,077 dan tahun 2020 juga mengalami hal yang sama yaitu sebesar Rp 1,046,068,391.

**Tabel 4. 11 Dana Alokasi Umum Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	DAU Kota Yogyakarta
2010	395444062
2011	436339933
2012	536466614
2013	597212209
2014	618742352
2015	622365351
2016	670278830
2017	658504186
2018	658504186
2019	700372564
2020	701377143

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.11, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi umum setiap tahunnya di wilayah kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dana alokasi umum di tahun 2010 hingga tahun 2016 yaitu sebesar Rp 395,444,062 hingga sebesar Rp 670,278,830. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 dana alokasi umum mengalami penurunan dengan besaran yang tetap yaitu pada Rp 658,504,186. Kenaikan dana alokasi umum terjadi di dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 700,372,564 dan tahun 2020 sebesar Rp 701,377,143.

4.2.4 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah modal yang dierikan kepada daerah untuk memenuhi keutuhan tertentu. Ada tiga kriteria kebutuhan khusus yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diterbitkan oleh BPS RI (2020) yaitu: 1. Kebutuhan tidak dapat dihitung dengan rumus alokasi dana umum, 2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional, 3. Kebutuhan membiayai kegiatan penghijauan yang berdasarkan areal produksi.

Dengan demikian, DAK pada dasarnya merupakan transfer yang spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan. Penelitian ini menggunakan data DAK dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta yang merujuk pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAK Kabupaten Kulon Progo
2010	41614100
2011	48343900
2012	45379520
2013	52894140
2014	47077300
2015	53806400
2016	317910881
2017	210264775
2018	260428865
2019	293857452
2020	305999979

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.12, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi khusus setiap tahunnya di wilayah kabupaten Kulon Progo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 41,614,100 dan Rp 48,343,900. Namun di

tahun 2013 dana alokasi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 45,379,520 dan juga mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp 52,894,140. Di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp 47,077,300 dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 53,806,400. Secara signifikan di tahun 2016 dana alokasi umum di kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar Rp 317,910,881 dan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 210,264,775. Di tiga tahun setelahnya yaitu tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 dana alokasi umum di kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup bertahap yaitu sebesar Rp 260,428,865 hingga sebesar Rp 305,999,979.

Tabel 4. 13 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAK Kabupaten Bantul
2010	60565500
2011	45925400
2012	63281450
2013	47196880
2014	60914370
2015	72359660
2016	119437060
2017	270134242
2018	356068686
2019	315907250
2020	339124949

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.13, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi khusus setiap tahunnya di wilayah kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada dua tahun

pertama yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2011, penurunan tersebut dari Rp 60,565,500 hingga Rp 45,925,400. Tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami hal yang sama yaitu terjadi penurunan dana alokasi khusus yang terjadi antara tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 63,281,450 turun di tahun 2013 sebesar Rp 47,196,880. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 dana alokasi khusus di kabupaten Bantul mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 72,359,660 hingga Rp 356,068,686. Tahun 2019 dana alokasi khusus turun sebesar Rp 315,907,250 dan tahun 2020 dana alokasi khusus naik sebesar Rp 339,124,949.

Tabel 4. 14 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAK Kabupaten Gunung Kidul
2010	77574200
2011	59168700
2012	70584420
2013	59793058
2014	61562860
2015	84971370
2016	388621885
2017	283708648
2018	331400947
2019	342547190
2020	379614854

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.14, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi khusus setiap tahunnya di wilayah kabupaten Gunung Kidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 77,574,200 dan Rp 59,168,700. Hal yang sama terjadi di tahun 2012 dan 2013 kenaikan dan penurunan sebesar Rp

70,584,420 dan sebesar Rp 59,793,058. Tahun 2014 hingga tahun 2016 dana alokasi khusus mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 61,562,860 hingga Rp 388,621,885. Tahun 2017 mengalami penurunan dana alokasi khusus sebesar Rp 283,798,648. Tahun 2018 hingga tahun 2020 dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar Rp 331,400,947 hingga sebesar Rp 379,614,854.

Tabel 4. 15 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAK Kabupaten Sleman
2010	69847300
2011	42650300
2012	52237390
2013	50823330
2014	48673210
2015	57469896
2016	443025718
2017	278580346
2018	339256284
2019	301566940
2020	339127892

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.15, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi khusus setiap tahunnya di wilayah kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 69,847,300 dan Rp 42,650,300. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 52,237,390 hingga Rp 48,673,210. Tahun 2015 dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar Rp 57,469,896. Tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan

terhadap dana alokasi khusus di kabupaten Sleman sebesar Rp 443,025,718 hingga di tahun 2020 sebesar Rp 339,127,892.

Tabel 4. 16 Dana Alokasi Khusus Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DAK Kota Yogyakarta
2010	13599100
2011	1762100
2012	6485350
2013	6220630
2014	2249900
2015	2342700
2016	241293711
2017	169715174
2018	188130100
2019	145960291
2020	165689591

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.16, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana alokasi khusus setiap tahunnya di wilayah kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan kenaikan dari dana alokasi khusus pada tahun 2010 hingga tahun 2015 dari sebesar Rp 13,599,100 pada tahun 2010 hingga hanya sebesar Rp 2,342,700 pada tahun 2015. Tahun 2016 hingga tahun 2020 dana alokasi khusus di kota Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari sebesar Rp 241,293,711 pada tahun 2016 hingga hanya sebesar Rp 165,689,591 di tahun 2020.

4.2.5 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah”. “Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam” (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 11). Dana bagi hasil menurut Halim dan Ibnu (2009) berfungsi untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan data DBH dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY yang merujuk pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Dana Bagi Hasil Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DBH Kabupaten Kulon Progo
2010	32186407
2011	24119556
2012	28552855
2013	33581903
2014	19983311
2015	18931791
2016	26100709
2017	26200470
2018	27678780
2019	13999609
2020	19225276

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.17, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil setiap tahunnya di wilayah kabupaten Kulon Progo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dari dana bagi hasil di kabupaten Kulon Progo yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 32,186,407 hingga tahun 2015 sebesar Rp 18,931,791. Pada tahun 2016 dan tahun 2018, dana bagi hasil kabupaten Kulon Progo meningkat sebesar Rp 27,678,780

dari sebesar Rp 26,100,709. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 13,999,609 dan sebesar Rp 19,225,276.

Tabel 4. 18 Dana Bagi Hasil Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DBH Kabupaten Bantul
2010	54598730
2011	36320597
2012	36859018
2013	36484564
2014	32302651
2015	26631974
2016	33336934
2017	34871179
2018	38161003
2019	19947002
2020	28634068

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.18, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil setiap tahunnya di wilayah kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dana bagi hasil di tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar Rp 54,598,730 hingga Rp 26,631,974. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, dana bagi hasil juga mengalami penurunan sebesar Rp 38,161,003 mencapai Rp 28,634,068.

Tabel 4. 19 Dana Bagi Hasil Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DBH Kabupaten Gunung Kidul
2010	34824463
2011	33242029
2012	28627495
2013	38552493
2014	23983388
2015	20771681
2016	27517205
2017	28812650
2018	27589808
2019	15569904
2020	20920172

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.19, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil setiap tahunnya di wilayah kabupaten Gunung Kidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan kenaikan di tahun 2010 hingga tahun 2015 yaitu sebesar Rp 34,824,463 hingga sebesar Rp 20,771,681. Di tahun 2016 hingga tahun 2020 juga mengalami penurunan dan peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp 27,517,205 hingga sebesar Rp 20,902,172.

**Tabel 4. 20 Dana Bagi Hasil Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020 (Rupiah)**

Tahun	DBH Kabupaten Sleman
2010	107029836
2011	95001828
2012	69426172
2013	50369188
2014	47735402
2015	38281937
2016	61833117
2017	60499721
2018	76118390
2019	33935957
2020	46383504

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.20, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil setiap tahunnya di wilayah kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2010 sebesar Rp 107,029,836 hingga tahun 2015 yaitu sebesar Rp 38,281,937. Pada tahun 2016 sebesar Rp 61,833,117 hingga tahun 2018 sebesar Rp 76,118,390 mengalami peningkatan pada dana bagi hasil di kabupaten Sleman. Namun pada tahun 2019 sebesar Rp 33,935,957 dan tahun 2020 sebesar Rp 46,383,504 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 4. 21 Dana Bagi Hasil Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	DBH Kota Yogyakarta
2010	75585121
2011	80932619
2012	32179747
2013	55338000
2014	64430649
2015	28040062
2016	55713758
2017	42293359
2018	66079502
2019	28975323
2020	41712972

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.21, dikatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil setiap tahunnya di wilayah kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dana bagi hasil dari yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar Rp 80,932,619 dan dana bagi hasil terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 28,040,062. Di tahun 2020 dana bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 41,712,972.

4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut UNDP hingga akhir 1990-an pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Setyowati dan Yohana, 2012). Setyowati dan Yohana (2012) mengatakan penetapan standar makro pembangunan ekonomi adalah laju

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah di provinsi tersebut. Dalam publikasi yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta juga mengatakan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dengan data yang digunakan adalah data yang terdapat dalam PDRB atas dasar harga konstan 2010 dengan periode tahun dari 2010 hingga 2020 pada kabupaten/kota di Provinsi DIY yang merujuk pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo
2010	5033000000
2011	5246000000
2012	5475000000
2013	5742000000
2014	6003000000
2015	6282000000
2016	6581000000
2017	6973000000
2018	7728000000
2019	8771000000
2020	8415000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.22, dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah kabupaten Kulon Progo, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari pertumbuhan ekonomi tertinggi di

tahun 2019 sebesar Rp 8,771,000,000 dan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2010 sebesar Rp 5,033,000,000.

Tabel 4. 23 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul
2010	12114000000
2011	12729000000
2012	13407000000
2013	14139000000
2014	14867000000
2015	15589000000
2016	16376000000
2017	17210000000
2018	18151000000
2019	19155000000
2020	18830000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.23, dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Bantul dari yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 19,155,000,000 dan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 12,114,000,000.

Tabel 4. 24 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Gunung Kidul
2010	8848000000
2011	9248000000
2012	9696000000
2013	10177000000
2014	10639000000
2015	11152000000
2016	11696000000
2017	12282000000
2018	12915000000
2019	13605000000
2020	13513000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.24, dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah kabupaten Gunung Kidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara bertahap dari yang tertinggi di tahun 2019 sebesar Rp 13,605,000,000 dan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2010 sebesar Rp 8,848,000,000.

Tabel 4. 25 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman
2010	21482000000
2011	22646000000
2012	23957000000
2013	25367000000
2014	26741000000
2015	28098000000
2016	29563000000
2017	31141000000
2018	33138000000
2019	35287000000
2020	33906000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.25, dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari yang tertinggi di tahun 2019 sebesar Rp 35,287,000,000 dan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2010 sebesar Rp 21,482,000,000.

Tabel 4. 26 Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta
2010	17202000000
2011	18206000000
2012	19189000000
2013	20240000000
2014	21312000000
2015	22393000000
2016	23536000000
2017	24768000000
2018	26127000000
2019	27685000000
2020	27015000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Pada tabel 4.25, dikatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di wilayah kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2019 yaitu sebesar Rp 27,685,000,000 namun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta mengalami penurunan sebesar Rp 27,015,000,000.

4.3 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dalam penelitian ini karena menggunakan data panel maka dengan menggunakan 3 alternatif model pengujian, yaitu *common effect models*, *fixed effect models*, dan *random effect models*. Dari ketiga alternatif model pengujian tersebut akan dipilih model yang baik dalam pengujian yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini.

4.3.1 Hasil Estimasi Pengujian Menggunakan *Common Effect Model*

Widarjono, 2018 menyatakan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *common effect* pada data panel merupakan pengujian yang sederhana,

dikatakan intersep dan koefisien yang terdapat dalam model *common effect* dianggap paling tetap sepanjang waktu.

Tabel 4. 27 Hasil Pengolahan Data dengan *Common Effect Model*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/06/21 Time: 21:13
 Sample: 2010 2020
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.58182	1.835749	41.7169	0
PAD?	0.0000000181	0.00000000426	4.24996	0.0001
DAU?	-0.0000000108	0.00000000269	-4.0094	0.0002
DAK?	-	0.00000000354	-1.6811	0.0991
DBH?	0.0000000291	0.0000000295	0.98815	0.3279
EG?	0.158736	0.144838	1.09595	0.2785
R-squared	0.838402	Mean dependent var		77.1149
Adjusted R-squared	0.821912	S.D. dependent var		5.49333
S.E. of regression	2.318211	Akaike info criterion		4.62214
Sum squared resid	263.3309	Schwarz criterion		4.84112
Log likelihood	-121.1088	Hannan-Quinn criter.		4.70682
F-statistic	50.84413	Durbin-Watson stat		0.78373
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui *Software EVIEWS 10*

Berdasarkan hasil pengujian dari model *common effect* dengan menggunakan *EVIEWS 10*, dikatakan bahwa besarnya koefisien variabel PAD adalah

0.00000000181 dengan *p-value* sebesar 0.0001, artinya variabel PAD hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien dari variabel DAU -0.0000000108 adalah dengan *p-value* sebesar 0.0002, artinya DAU memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel DAK adalah -0.00000000596 dengan *p-value* sebesar 0.0991, artinya DAK memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel DBH adalah 0.00000000291 dengan *p-value* sebesar 0.3279, artinya DBH memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*(EG)) adalah 0.15876 dengan *p-value* sebesar 0.2785, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY.

Variabel dependen yaitu IPM jika dikatakan variabel independen bernilai nol dengan besar koefisien adalah 76.58182 dengan nilai *R-Squared* sebesar 0.838402 atau 83.84% yang dapat dikatakan terdapat adanya perubahan pada variabel dependen yaitu IPM yang dapat dijelaskan pada variabel independen. Dengan nilai *F-Statistic* sebesar 50.88413 dengan *p-value* sebesar 0.0000 yang berarti variabel independen terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu IPM.

4.3.2 Hasil Estimasi Pengujian Menggunakan *Fixed Effect Model*

Menurut Widarjono (2018) *Fixed Effect Model* merupakan penggabungan data yang digunakan yaitu data *time series* dan *cross section* dengan melihat adanya perbedaan intersep namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*) dengan menggunakan variabel *dummy*.

Tabel 4. 28 Hasil Pengolahan Data dengan *Fixed Effect Model*

Date: 12/07/21 Time: 14:44

Sample: 2010 2020
 Included observations: 11
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48677	3.601229	18.73993	0
PAD?	0.00000000647	0.0000000382	0.169391	0.8662
DAU?	-0.0000000537	0.0000000254	-2.11152	0.0403
DAK?	-0.0000000260	0.0000000254	-1.02143	0.3125
DBH?	0.0000001130	0.000000198	0.571363	0.5706
EG?	0.799169	0.23774	3.361522	0.0016
Fixed Effects (Cross)				
_KULON_PROGO--C	4.392795			
_BANTUL—C	2.06158			
_GUNUNG_KIDUL--C	-2.491772			
_SLEMAN—C	-4.556419			
_KOTA_YOGYAKARTA—C	0.593816			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.951902	Mean dependent var	77.11491
Adjusted R-squared	0.942283	S.D. dependent var	5.493326
S.E. of regression	1.319741	Akaike info criterion	3.555713
Sum squared resid	78.37719	Schwarz criterion	3.920683
Log likelihood	-87.78211	Hannan-Quinn criter.	3.69685
F-statistic	98.95487	Durbin-Watson stat	0.945715
Prob(F-statistic)	0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui *Software EVIEWS 10*

Berdasarkan hasil pengujian dari model *fixed effect* dengan menggunakan bantuan *software EVIEWS 10*, dikatakan bahwa besarnya koefisien variabel PAD adalah 0.00000000647 dengan *p-value* sebesar 0.8862, artinya PAD memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota

Provinsi DIY. Besarnya koefisien dari variabel DAU adalah -0.00000000537 dengan *p-value* sebesar 0.0403, artinya DAU memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel DAK adalah -0.00000000260 dengan *p-value* sebesar 0.3125, artinya DAK memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel DBH adalah 0.0000000113 dengan *p-value* sebesar 0.5706, artinya DBH memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Besarnya koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*(EG)) adalah 0.799169 dengan *p-value* sebesar 0.0016, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY.

Variabel dependen yaitu IPM jika dikatakan variabel independen nol dengan besar koefisien adalah 67.48677 dengan nilai *R-Squared* sebesar 0.951902 atau 95.19% yang dapat dikatakan terdapat adanya perubahan pada variabel dependen yaitu IPM yang dapat dijelaskan pada variabel independen. Dengan nilai *F-Statistic* sebesar 98.95847 dengan *p-value* sebesar 0.0000 yang berarti variabel independen terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu IPM.

4.3.3 Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih model paling layak antara *common effect models* dengan *fixed effect models* (Widarjono, 2018). Dengan penggunaan hipotesis nol adalah *common effect* model lebih baik dan hipotesis alternatif adalah *fixed effect* model lebih baik (Widarjono, 2018). Apabila telah dibandingkan hasilnya menolak hipotesis nol menurut Widarjono (2018), maka model *fixed effect* lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika gagal menolak hipotesis nol menurut Widarjono (2018), maka model *common effect* lebih baik digunakan.

Tabel 4. 29 Hasil Estimasi dengan Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PERSAMAAN

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.547639	(4,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	66.653318	4	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui *Software EViews 10*

Pemilihan model menggunakan Uji *chow* memiliki nilai statistic 66.653318 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang dimana bernilai signifikan terhadap α sebesar 5% dan memiliki arti bahwa menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, maka model *fixed effect* lebih baik digunakan dan terpilih dalam penelitian.

4.4 Hasil Regresi

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah dilakukan pengujian terhadap pemilihan model yang didapatkan dari pemilihan model adalah dengan menggunakan *fixed effect model* yang merupakan model paling tepat digunakan. Tahap selanjutnya adalah memperkirakan yang didapat dalam hasil regresi dengan menggunakan presentase dari variasi total pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen, untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan pengujian yang ditunjukkan oleh Koefisien Determinasi (*adjusted R2*) (Widarjono, 2018).

Dependent Variable: IPM?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/07/21 Time: 14:44
Sample: 2010 2020

Included observations: 11
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48677	3.601229	18.7399	0
PAD?	0.00000000647	0.0000000382	0.16939	0.8662
DAU?	-0.0000000537	0.0000000254	-2.1115	0.0403
DAK?	-0.0000000260	0.0000000254	-1.0214	0.3125
DBH?	0.000000113	0.000000198	0.57136	0.5706
EG?	0.799169	0.23774	3.36152	0.0016

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.951902	Mean dependent var	77.1149	
Adjusted R-squared	0.942283	S.D. dependent var	5.49333	
S.E. of regression	1.319741	Akaike info criterion	3.55571	
Sum squared resid	78.37719	Schwarz criterion	3.92068	
Log likelihood	-87.78211	Hannan-Quinn criter.	3.69685	
F-statistic	98.95487	Durbin-Watson stat	0.94572	
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui *Software EViews 10*

Hasil output dari regresi tersebut didapatkan *adjusted R2* atau koefisien determinasi sebesar 0.951902 atau sebesar 95.91%, artinya variabel indeks pembangunan manusia dapat diterangkan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan

ekonomi dan sisanya sebesar 4.09% variabel indeks pembangunan manusia diterangkan oleh variabel bebas di luar model.

4.4.2 Uji f

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen atau tidak (Widarjono, 2018). Dengan kriteria pengujian jika probabilitas $> \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, maka secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Jika probabilitas $< \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, maka secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dapat dilihat dari hasil regresi bahwa *F-Statistic* sebesar 98.95487 dan probabilitas sebesar 0.000000 yang dimana dapat dikatakan $<$ dari α sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

4.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi DIY periode tahun 2010 hingga 2020.

Dengan kriteria pengujian jika:

- a. Probabilitas $> \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, maka variabel independen diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi

khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia.

- b. Probabilitas $< \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, maka variabel independen diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews 10* didapat bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki probabilitas sebesar $0.8862 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar 0.00000000647, yang memiliki arti ketika PAD sebesar 1% meningkat, maka jumlah IPM di kabupaten/kota di Provinsi DIY akan mengalami terjadinya peningkatan sebesar 0.00000000647%.

4.4.3.2 Dana Alokasi Umum

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews 10* didapat bahwa variabel dana alokasi umum dengan memiliki probabilitas sebesar $0.0403 < \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar -0.00000000537, yang memiliki arti yaitu ketika DAU meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya penurunan sebesar -0.00000000537%.

4.4.3.3 Dana Alokasi Khusus

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews* 10 didapat bahwa variabel dana alokasi khusus dengan memiliki probabilitas sebesar $0.3125 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar -0.00000000260, yang memiliki arti yaitu ketika DAK meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya penurunan sebesar -0.00000000260%.

4.4.3.4 Dana Bagi Hasil

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews* 10 didapat bahwa variabel dana bagi hasil dengan memiliki probabilitas sebesar $0.5706 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana bagi hasil memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar 0.0000000113, yang memiliki arti yaitu ketika DBH meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya peningkatan sebesar 0.0000000113%.

4.4.3.5 Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews* 10 didapat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dengan memiliki probabilitas sebesar $0.0016 < \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar 0.799169, yang memiliki arti yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya kenaikan sebesar 0.000799169%.

4.5 Hasil Analisis Per-Kabupaten/Kota

Dapat dilihat di bawah ini merupakan hasil analisis dengan melihat perbedaan konstanta dari masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi DIY, dimana dengan penggunaan data panel dalam pengolahan regresi akan menghasilkan konstanta yang berbeda pada setiap wilayah dan setiap periode waktu (Widarjono, 2018).

Tabel 4. 30 *Crosseffect Fixed Effect Models*

No	Kabupaten/Kota	Koefisien	C	Konstanta
1	Kulon Progo	4.392795	67.4868	71.879565
2	Bantul	2.06158	67.4868	69.54835
3	Gunung Kidul	-2.49177	67.4868	64.994998
4	Sleman	-4.55642	67.4868	62.930351
5	Kota Yogyakarta	0.593816	67.4868	68.080586

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *EViews* 10, data diolah



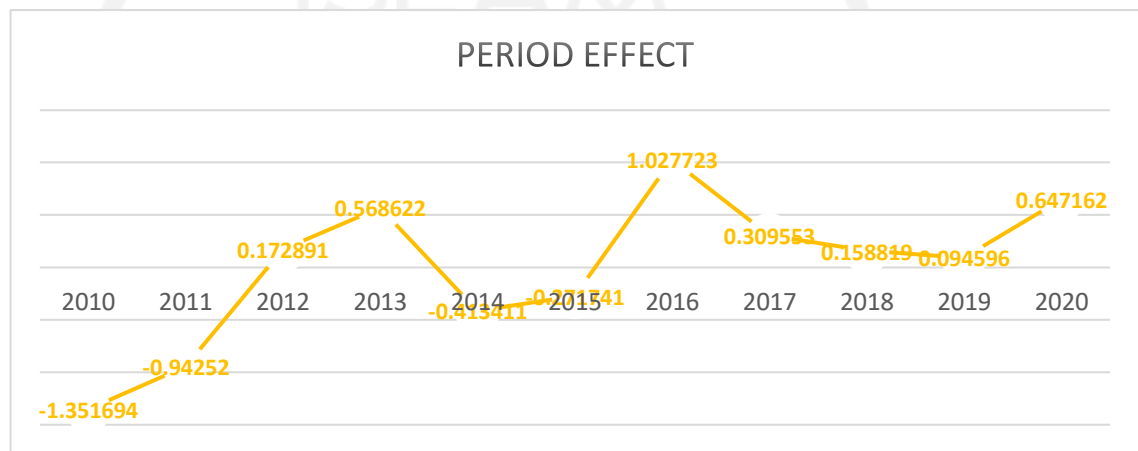
Gambar 4. 1 Konstanta Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *Software EViews* 10, data diolah

Pada gambar 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi DIY tertinggi adalah kabupaten/kota Kulon Progo yang memiliki konstanta sebesar 71.879565. Selanjutnya disusul oleh kabupaten/kota Bantul yang memiliki konstanta sesuai tabel diatas adalah sebesar 69.54835. Kemudian, dilanjutkan oleh kota Yogyakarta dengan konstanta sebesar 68.080586. Selanjutnya,

kabupaten/kota Gunung Kidul dengan konstanta sebesar 64.994998. Indeks Pembangunan Manusia terendah terdapat pada kabupaten/kota Sleman dengan konstanta sebesar 62.930351.

Berikut ini merupakan efek periode (*periode effect*) dari hasil pengolahan yang dilakukan melalui *software EVIEWS 10*.



Gambar 4. 2 Period Effect

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *Software EVIEWS 10*, data diolah

Dapat dilihat pada gambar 4.2 diatas, bahwa efek periode (*period effect*) terjadi pada setiap tahun selama tahun 2010 hingga 2020 dengan nilai yang berbeda-beda disetiap tahunnya. Dimulai dengan tahun 2010 dengan nilai efek periode sebesar -1.351694, selanjutnya pada tahun 2011 nilai dari efek periode tersebut meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar -0.94252, pada tahun 2012 dan 2013 juga nilai efek periode meningkat yang masing-masing sebesar 0.172891 dan 0.568622. Namun, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -0.413411, yang dilanjutkan dengan tahun 2015 yang secara perlahan-lahan efek periode tersebut meningkat sebesar -0.27174. Pada tahun 2016 efek periode meningkat secara drastic sebesar 1.027723, yang selanjutnya menurun pada tahun 2017, 2018, 2019 secara perlahan-lahan yang masing-masing sebesar 0.309553, 0.158819, dan 0.094596. Terakhir, tahun 2020 nilai efek peride sebesar 0.647162.

4.6 Interpretasi Hasil Analisis

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil dari estimasi didapat bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki probabilitas sebesar $0.8862 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Dengan koefisien regresi sebesar 0.000000000647, yang memiliki arti ketika PAD sebesar 1% meningkat, maka jumlah IPM di kabupaten/kota di Provinsi DIY akan mengalami terjadinya peningkatan sebesar 0.000000000647%.

Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel independen dari pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dugaan yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dikarenakan pendapatan asli daerah berfungsi untuk mengurangi ketergantungan daerah di wilayah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus dilakukan seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari sumber tersebut harus bisa efektif dan efisien mengalokasikan penerimaannya pada layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah tersebut yang dapat menaikkan secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi didapat bahwa variabel dana alokasi umum dengan memiliki probabilitas sebesar $0.0403 < \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar -0.00000000537, yang memiliki arti yaitu ketika DAU meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya penurunan sebesar -0.00000000537%.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dugaan yang mengatakan bahwa dana alokasi umum pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebabkan ketika terjadi kenaikan dana alokasi umum, maka tidak diikuti dengan kenaikan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020, walaupun indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum diserahkan kepada daerah tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, yang dimana tidak terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan fiskal daerah di wilayah tersebut yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, yang akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi didapat bahwa variabel dana alokasi khusus dengan memiliki probabilitas sebesar $0.3125 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana alokasi khusus memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar -0.00000000260, yang memiliki arti yaitu ketika DAK meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya penurunan sebesar -0.00000000260%.

Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel dana alokasi khusus memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta di tahun 2010 hingga tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dugaan yang menyakatakan dana alokasi khusus pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Dikarenakan pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi fisik dan bangunan melainkan juga dari segi hidup dan manusia, sementara DAK lebih digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dimana hal tersebut menggunakan segi fisik dalam penerapannya dan juga dalam penyalurannya DAK tidak dialokasikan untuk meningkatkan IPM pada kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan untuk belanja operasional lainnya di wilayah tersebut.

4.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi didapat bahwa variabel dana bagi hasil dengan memiliki probabilitas sebesar $0.5706 > \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel dana bagi hasil memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar 0.0000000113, yang memiliki arti yaitu ketika DBH meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di

kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya peningkatan sebesar 0.0000000113%.

Hasil penelitian menyatakan variabel dana bagi hasil memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dugaan yang menyatakan dana bagi hasil pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Dikarenakan pengaturan yang dilakukan oleh pusat terhadap daerah di wilayah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal DBH memberikan ketidakpastian keuangan daerah karena perkiraan realisasi ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemungut pajak pusat yang akan dibagikan ke daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga alokasi DBH tidak sesuai dengan realisasi penerimaan negara menyebabkan kurang bayar DBH yang mengganggu pelaksanaan anggaran daerah di wilayah tersebut. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat leluasa dalam penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak dan berpengaruh pada IPM.

4.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil dari pengolahan menggunakan *software EViews 10* didapat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dengan memiliki probabilitas sebesar $0.0016 < \alpha$ sebesar 5% atau 0.05, artinya variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan koefisien regresi sebesar 0.799169, yang memiliki arti yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka jumlah IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY akan mengalami terjadinya kenaikan sebesar -0.000799169%.

Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi menurut PDRB atas harga konstan tahun 2010 memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, yang artinya terjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah kabupaten/kota Provinsi DIY. Sesuai dengan pernyataan UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijabarkan bahwa didapat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *fixed effect model*. Berikut ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah akan menaikkan IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Dikarenakan pendapatan asli daerah berfungsi untuk mengurangi ketergantungan daerah di wilayah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah pusat. mengalokasikan penerimaannya pada layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah tersebut yang dapat menaikkan secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila terjadi peningkatan dana alokasi umum akan menurunkan IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum hanya digunakan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang diterapkan pada peningkatan IPM yang mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap dampak dari kualitas sumber daya manusianya.
3. Variabel dana alokasi khusus memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila terjadi peningkatan dana alokasi

khusus akan menurunkan IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus hanya digunakan untuk dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang mengakibatkan tidak terjadinya pengaruh terhadap perubahan peningkatan pada IPM dalam kualitas sumber dayanya.

4. Variabel dana bagi hasil memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila terjadi peningkatan dana bagi hasil akan menaikkan IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan dana bagi hasil dialokasikan kepada daerah di wilayah kabupaten/kota Provinsi DIY yang dilihat berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap perubahan peningkatan pada IPM dalam kualitas sumber dayanya.
5. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan IPM di kabupaten/kota Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan Provinsi DIY mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang akan memiliki pengaruh terhadap IPM yang juga terus meningkat sesuai dengan menurut UNDP, dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan sejalan dengan IPM pada pendapatan per kapita yang juga meningkat pula.

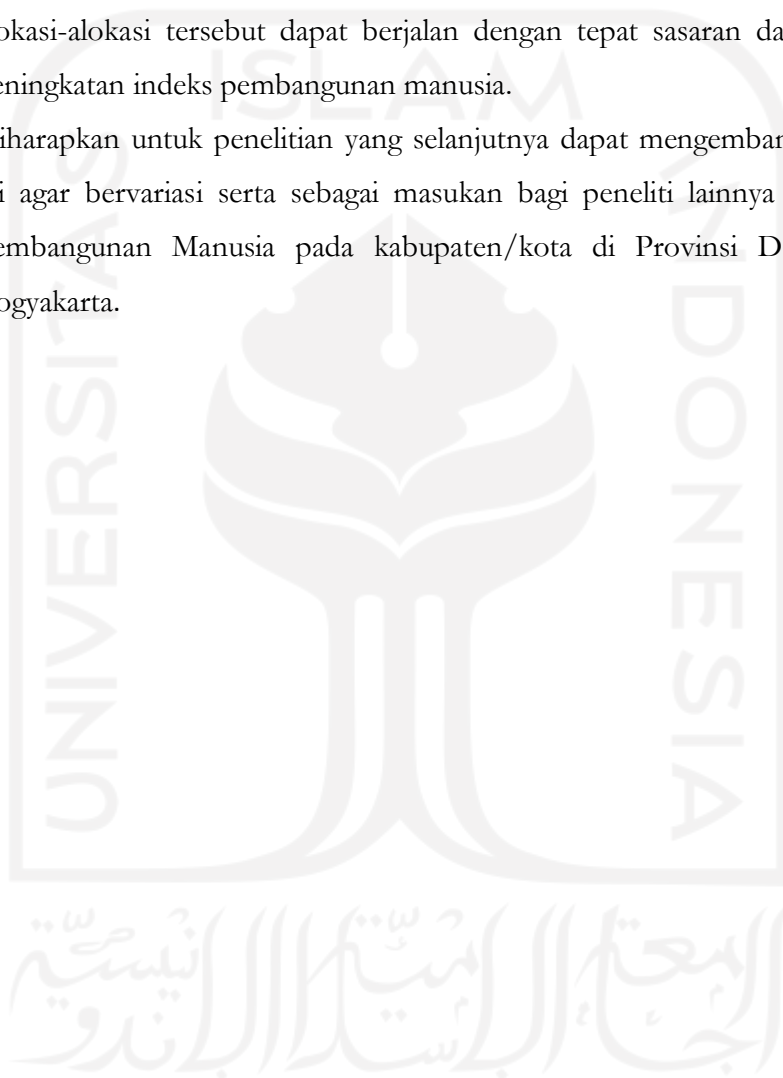
5.2 Implikasi

Beberapa implikasi yang dapat digunakan, dalam memecahkan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus bisa lebih mengembangkan dan melakukan pengawasan terhadap alokasi-alokasi yang digunakan untuk kemandirian daerah dalam menentukan pendapatan

asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang memprioritaskan dalam bidang-bidang strategis seperti pembiayaan infrastruktur, pembiayaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di wilayah kabupaten/kota Provinsi DIY sehingga alokasi-alokasi tersebut dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berguna bagi peningkatan indeks pembangunan manusia.

2. Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini agar bervariasi serta sebagai masukan bagi peneliti lainnya tentang Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Daftar Pustaka

- Ardhani, Pungky. (2011), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal," *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Arsyad Licolin. (2004), "Ekonomi Pembangunan," Edisi keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2010), "Indeks Pembangunan Manusia 2010," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2011), "Indeks Pembangunan Manusia 2011," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2012), "Indeks Pembangunan Manusia 2012," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2013), "Indeks Pembangunan Manusia 2013," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014), "Indeks Pembangunan Manusia 2014," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015), "Indeks Pembangunan Manusia 2015," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016), "Indeks Pembangunan Manusia 2016," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Pembangunan Manusia 2017. *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018), "Indeks Pembangunan Manusia 2018," *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2019), “Indeks Pembangunan Manusia 2019,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2020), “Indeks Pembangunan Manusia 2020,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2011), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2010-2011,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2012), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2014), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2016), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2018), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2020), “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, Jakarta

Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta. (2020), “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY Tahun 2020,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi*, D.I Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta. (2014), “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Tahun 2010-2014,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi*, D.I Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta. (2019), “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Tahun 2015-2019,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi*, D.I Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta. (2020), “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Tahun 2016-2020,” *Katalog Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi*, D.I Yogyakarta.

BAPPENAS. (2003), “Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah,” Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Christy, dan Adi. (2009), “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia,” *The 3rd National Conference UKWMS* Surabaya, Oktober 10th 2009.

Halim, dan Ibnu. (2009), “Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah,” Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

Hananto, Fian. (2018), “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016),” *Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika* Universitas Islam Indonesia.

Handayani, Hesti. (2020), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 4-18.

Lestari, *et al.* (2016), “Analisi Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016,” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* Universitas Tidar, Hal 100-112

Lugastoro, Dectra Pitron. (2013), “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Universitas Brawijaya Malang, Hal 1-19

Nindhita. (2018), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Hal 1-19

Putra, dan Ulupui. (2016), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Pada Tahun 2009-2013,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 3, Hal 863-877.

Pemerintah Daerah DIY. (2020), “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Peraturan Menteri Keuangan No.171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2009.

Pratowo, Irsa N. (2011), “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, Vol.1 No.1, Hal 15-31

Priambodo, Anugrah. (2015), “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.

Rahmayati, A., & Pertiwi, I. F. (2018), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Surakarta. E-ISSN 2615-1782.

Republik Indonesia. (2004), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2004), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Rifai, Ahmad. (2016), “Faktor-Faktor Yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2013,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.

Rosmadayanti, *et al.* (2021), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur,” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 8.

Sarkoro, dan Zulfikar. (2016), “Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)”, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Hal 54-63

Setyowati, dan Yohana Kus Suparwati. (2012), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah),” *Jurnal Prestasi*, Vol. 9 No. 1, Hal 114-133

Siddiq, *et al.* (2020). “Kajian Pustaka Dalam Artikel Jurnal,” *Penulisan Artikel dan Karangan Khas Universitas Pendidikan Indonesia*, Hal 1-25.

Suryadi, Ace. (2008), “Mengejar Peringkat HDI Negara-negara di Lingkungan ASEAN: Benchmarking Indonesia dan Vietnam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 1, 2008. Hal: 57-76.

Sriyana, J. (2014), “Metode Regresi Data Panel,” *Ekonesia*. Yogyakarta

Tamaro, *et al.* (2021), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018,” *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-26

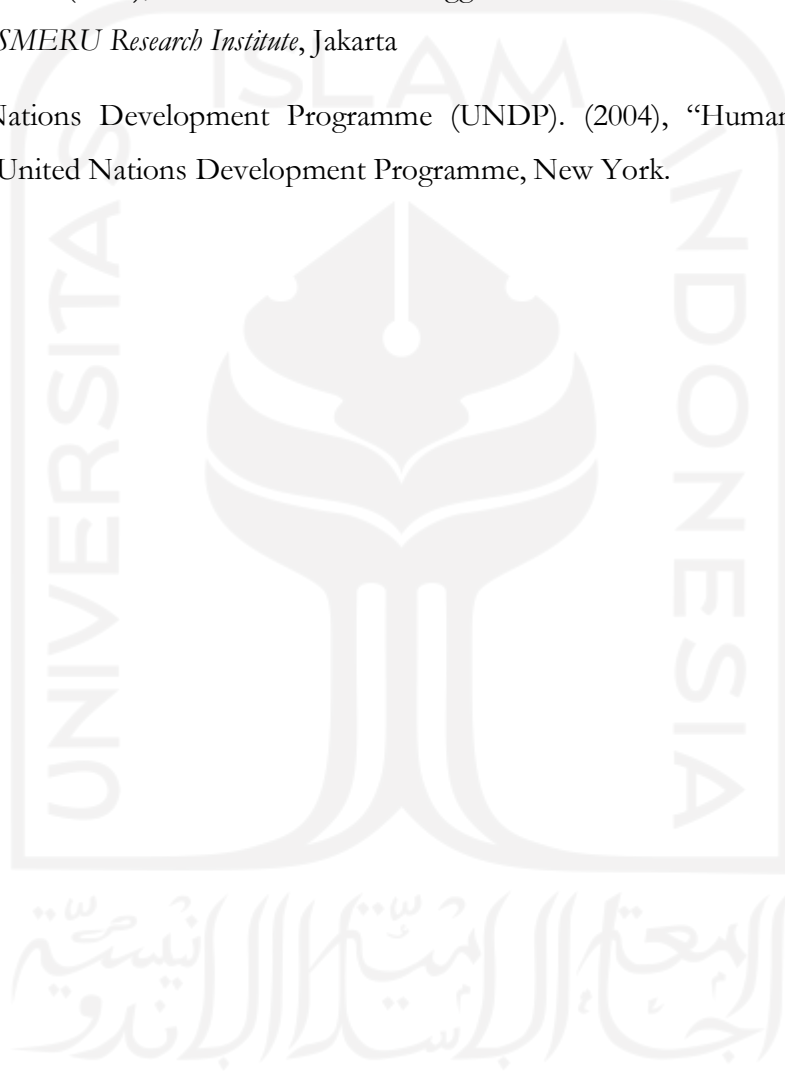
Widarjono, Agus. (2018), “Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews,” Edisi kelima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Wijaya, Toni. (2007), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Modus*, Vol. 19, No. 2

Williantara, dan Budiasih. (2016), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16/3, Hal 2044-2070

Usman, *et al.* (2008), “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus,” *Lembaga Penelitian SMERU Research Institute*, Jakarta

United Nations Development Programme (UNDP). (2004), “Human Development Report,” United Nations Development Programme, New York.



LAMPIRAN

Lampiran A.

Data Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam Persen)

Kota/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	74,49	75,04	75,33	75,95	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	74,53	75,05	75,51	76,01	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunung Kidul	70,45	70,84	71,11	71,64	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	78,20	78,79	79,39	79,97	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Kota Yogyakarta	79,52	79,89	80,24	80,51	83,78	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY tahun 2010-2020, diolah

2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	PAD Kabupaten Kulon Progo
2010	48589685
2011	49488455
2012	54293141
2013	95991513
2014	92815160
2015	170822327
2016	172434611
2017	249692649
2018	207069272
2019	237876805
2020	247920164

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

b. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	PAD Kabupaten Bantul
2010	81637099
2011	106885124
2012	121593862
2013	224197864
2014	265128265
2015	390624492
2016	349492790
2017	494179068
2018	420143107
2019	505929472
2020	469798331

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

- c. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020

Tahun	PAD Kabupaten Gunung Kidul
2010	42542031
2011	41835405
2012	55600362
2013	83427448
2014	90333149
2015	196099245
2016	172352154
2017	271370044
2018	208747851
2019	254810945
2020	245880406

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

- d. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	PAD Kabupaten Sleman
2010	163056459
2011	170916683
2012	220367231
2013	449270306
2014	383497912
2015	643130080
2016	614410594
2017	825637752
2018	762514524
2019	972049575
2020	944481899

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

- e. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	PAD Kota Yogyakarta
2010	179423640
2011	182785819
2012	241190745
2013	383052140
2014	404272608
2015	510548823
2016	503488602
2017	657049377
2018	551493528
2019	689049725
2020	671770479

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

3. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Dana Alokasi Umum Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020

Tahun	DAU Kabupaten Kulon Progo
2010	411293618
2011	444247738
2012	531104016
2013	594978790
2014	639409211
2015	657260489
2016	718490508
2017	705868940
2018	705868940
2019	732088720
2020	737498209

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

b. Dana Alokasi Umum Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAU Kabupaten Bantul
2010	573512337
2011	625350000
2012	768034584
2013	854810634
2014	949252188
2015	942850827
2016	999814365
2017	982250842
2018	982250842
2019	1015302849
2020	1025870924

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

- c. Dana Alokasi Umum Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020

Tahun	DAU Kabupaten Gunung Kidul
2010	521293704
2011	572300004
2012	687944489
2013	779069238
2014	847388294
2015	872566961
2016	954997369
2017	938221136
2018	938221136
2019	965080463
2020	976430315

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

d. Dana Alokasi Umum Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAU Kabupaten Sleman
2010	563320892
2011	631920663
2012	795708767
2013	891589912
2014	952102502
2015	984410612
2016	1014310630
2017	996492454
2018	996492454
2019	1035862077
2020	1046068391

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

- e. Dana Alokasi Umum Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAU Kota Yogyakarta
2010	395444062
2011	436339933
2012	536466614
2013	597212209
2014	618742352
2015	622365351
2016	670278830
2017	658504186
2018	658504186
2019	700372564
2020	701377143

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010-2020, diolah

4. Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020

Tahun	DAK Kabupaten Kulon Progo
2010	41614100
2011	48343900
2012	45379520
2013	52894140
2014	47077300
2015	53806400
2016	317910881
2017	210264775
2018	260428865
2019	293857452
2020	305999979

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

b. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAK Kabupaten Bantul
2010	60565500
2011	45925400
2012	63281450
2013	47196880
2014	60914370
2015	72359660
2016	119437060
2017	270134242
2018	356068686
2019	315907250
2020	339124949

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- c. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2010-2020

Tahun	DAK Kabupaten Gunung Kidul
2010	77574200
2011	59168700
2012	70584420
2013	59793058
2014	61562860
2015	84971370
2016	388621885
2017	283708648
2018	331400947
2019	342547190
2020	379614854

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

d. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAK Kabupaten Sleman
2010	69847300
2011	42650300
2012	52237390
2013	50823330
2014	48673210
2015	57469896
2016	443025718
2017	278580346
2018	339256284
2019	301566940
2020	339127892

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- e. Dana Alokasi Khusus Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DAK Kota Yogyakarta
2010	13599100
2011	1762100
2012	6485350
2013	6220630
2014	2249900
2015	2342700
2016	241293711
2017	169715174
2018	188130100
2019	145960291
2020	165689591

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

5. Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Dana Bagi Hasil Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DBH Kabupaten Kulon Progo
2010	32186407
2011	24119556
2012	28552855
2013	33581903
2014	19983311
2015	18931791
2016	26100709
2017	26200470
2018	27678780
2019	13999609
2020	19225276

b. Dana Bagi Hasil Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DBH Kabupaten Bantul
2010	54598730
2011	36320597
2012	36859018
2013	36484564
2014	32302651
2015	26631974
2016	33336934
2017	34871179
2018	38161003
2019	19947002
2020	28634068

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

c. Dana Bagi Hasil Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DBH Kabupaten Gunung Kidul
2010	34824463
2011	33242029
2012	28627495
2013	38552493
2014	23983388
2015	20771681
2016	27517205
2017	28812650
2018	27589808
2019	15569904
2020	20920172

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- d. Dana Bagi Hasil Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DBH Kabupaten Sleman
2010	107029836
2011	95001828
2012	69426172
2013	50369188
2014	47735402
2015	38281937
2016	61833117
2017	60499721
2018	76118390
2019	33935957
2020	46383504

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

e. Dana Bagi Hasil Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	DBH Kota Yogyakarta
2010	75585121
2011	80932619
2012	32179747
2013	55338000
2014	64430649
2015	28040062
2016	55713758
2017	42293359
2018	66079502
2019	28975323
2020	41712972

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo
2010	5033000000
2011	5246000000
2012	5475000000
2013	5742000000
2014	6003000000
2015	6282000000
2016	6581000000
2017	6973000000
2018	7728000000
2019	8771000000
2020	8415000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- b. Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul
2010	12114000000
2011	12729000000
2012	13407000000
2013	14139000000
2014	14867000000
2015	15589000000
2016	16376000000
2017	17210000000
2018	18151000000
2019	19155000000
2020	18830000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- c. Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Gunung Kidul
2010	8848000000
2011	9248000000
2012	9696000000
2013	10177000000
2014	10639000000
2015	11152000000
2016	11696000000
2017	12282000000
2018	12915000000
2019	13605000000
2020	13513000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- d. Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman
2010	21482000000
2011	22646000000
2012	23957000000
2013	25367000000
2014	26741000000
2015	28098000000
2016	29563000000
2017	31141000000
2018	33138000000
2019	35287000000
2020	33906000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

- e. Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB atas dasar harga konstan Kota Yogyakarta di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta
2010	17202000000
2011	18206000000
2012	19189000000
2013	20240000000
2014	21312000000
2015	22393000000
2016	23536000000
2017	24768000000
2018	26127000000
2019	27685000000
2020	27015000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Republik Indonesia tahun 2010-2020, diolah

Lampiran B.

Hasil Uji *Common* dan *Fixed Effect*

1. *Common Effect Model*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/06/21 Time: 21:13
 Sample: 2010 2020
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.58182	1.835749	41.7169	0
PAD?	0.0000000181	0.00000000426	4.24996	0.0001
DAU?	-0.0000000108	0.00000000269	-4.0094	0.0002
DAK?	-0.00000000596	0.00000000354	-1.6811	0.0991
DBH?	0.0000000291	0.0000000295	0.98815	0.3279
EG?	0.158736	0.144838	1.09595	0.2785
R-squared	0.838402	Mean dependent var		77.1149
Adjusted R-squared	0.821912	S.D. dependent var		5.49333
S.E. of regression	2.318211	Akaike info criterion		4.62214
Sum squared resid	263.3309	Schwarz criterion		4.84112
Log likelihood	-121.1088	Hannan-Quinn criter.		4.70682
F-statistic	50.84413	Durbin-Watson stat		0.78373
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *EViews 10*

2. Fixed Effect Model

Date: 12/07/21 Time: 14:44
 Sample: 2010 2020
 Included observations: 11
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48677	3.601229	18.73993	0
PAD?	0.00000000647	0.00000000382	0.169391	0.8662
DAU?	-0.00000000537	0.00000000254	-2.11152	0.0403
DAK?	-0.00000000260	0.00000000254	-1.02143	0.3125
DBH?	0.00000001130	0.0000000198	0.571363	0.5706
EG?	0.799169	0.23774	3.361522	0.0016
Fixed Effects (Cross)				
_KULON_PROGO--C	4.392795			
_BANTUL—C	2.06158			
_GUNUNG_KIDUL--C	-2.491772			
_SLEMAN—C	-4.556419			
_KOTA_YOGYAKARTA—C	0.593816			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.951902	Mean dependent var	77.11491
Adjusted R-squared	0.942283	S.D. dependent var	5.493326
S.E. of regression	1.319741	Akaike info criterion	3.555713
Sum squared resid	78.37719	Schwarz criterion	3.920683
Log likelihood	-87.78211	Hannan-Quinn criter.	3.69685
F-statistic	98.95487	Durbin-Watson stat	0.945715
Prob(F-statistic)	0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *EViews* 10

Lampiran C.

1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PERSAMAAN

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.547639	(4,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	66.653318	4	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *EViews* 10

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,



Aprilia Tungga Dewi

PENGESAHAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama : Aprilia Tungga Dewi
Nomor Mahasiswa : 18313138
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si



BERITA ACARA REVISI TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Pada tanggal di bawah ini telah dilaksanakan ujian tugas akhir atas:

Nama : **APRILIA TUNGGGA DEWI**

No. Mahasiswa : **18313138**

Materi tugas akhir yang direvisi/diperbaiki:

Halaman	Hal-hal yang perlu diperbaiki
	Latar belakang → mengapa memilih DIY
	Penulisan disesuaikan dgn EYD dan buku pedoman penulisan skripsi
	Interprestasi hasil olahan diperbaiki, alasan utk variabel yang hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis
	Kesimpulan dan saran diperbaiki, sesuai dengan hasil analisis
	Tata tulis rumus diperbaiki sesuai standar rumus: subscript dll
	Gambar kerangka pemikiran diberi tanda arah/panah
	Alasan mengapa Jogja yang dipilih..?
	Pembahasan dan kesimpulan disesuaikan: DAU signifikan negatif
	Kesimpulan direvisi lebih sederhana

Tugas akhir tersebut diatas: Diuji lagi/Tidak diuji lagi *)

Tanggal Ujian : 14 Maret 2022

Penguji,

Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal :

Penguji,

Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

Pembimbing,

Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.

30 Maret 2022

Pembimbing,

Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

*) Batas Revisi 2 (dua) bulan setelah ujian dilaksanakan jika melebihi batas, kelulusan dinyatakan BATAL dan wajib mengulang ujian. (Buku panduan akademik tentang aturan ujian skripsi dan komprehensif)

Revisi Berita Acara yang telah ditandatangani pembimbing dan penguji diserahkan ke Divisi Akademik(akademik.fbe@uii.ac.id)

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA)


Disusun Oleh : **APRILIA TUNGGGA DEWI**

Nomor Mahasiswa : **18313138**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 14 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.

.....


Penguji : Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

.....


Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.



Nama Mahasiswa : **APRILIA TUNGGU DEWI**

No. Mahasiswa : **18313138**

Penelitian:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA)

Naskah Publikasi telah di review oleh Tim Penguji pada tanggal, 14 Maret 2022 dengan hasil ^{*)}:

1. Layak dipublikasikan tanpa perbaikan
2. Layak dipublikasikan dengan perbaikan
3. Tidak layak dipublikasikan

Penguji,

Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

Pembimbing,

Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal : 30 Maret 2022

Penguji,

Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

Pembimbing,

Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.

^{*)} Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Genap 2021/2022, hari, tanggal Senin, 14 Maret 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : **APRILIA TUNGGU DEWI**
No. Mahasiswa : **18313138**
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA)**
Pembimbing : **Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.**

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir/Skripsi tersebut dinyatakan:


1. **Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
 - a. ~~Tugas Akhir tidak direvisi~~
 - b. ~~Tugas Akhir perlu direvisi~~
2. **~~Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir~~**

Nilai : **A**
Referensi : **Layak/Tidak Layak *)** ditampilkan di Perpustakaan


Tim Penguji

Ketua Tim : **Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.**

Anggota Tim : **Diana Wijayanti, S.E., M.Si.**



.....



.....



Yogyakarta, 14 Maret 2022
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.

Keterangan:

*) *Coret yang tidak perlu*
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan
Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi
Akademik

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA)

Disusun Oleh : **APRILIA TUNGGGA DEWI**

Nomor Mahasiswa : **18313138**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 14 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.



Penguji : Diana Wijayanti, S.E., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.